

**PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**
(Studi Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Embung di Desa
Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Ilmu Pemerintahan**



NUR SETYAJI PRAJOKO

21520095

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
2025**



HALAMAN JUDUL

**PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR**

(Studi Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Embung di Desa
Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:
NUR SETYAJI PRAJOKO
21520095

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 23 April 2025

Jam : 11.30 WIB - Selesai

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A.

Ketua Penguji / Pembimbing

2. Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si.

Penguji Samping I

3. Dr. RY. Gembong Rahmadi, S.H.,

M.Hum.

Penguji Samping II

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
(Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A.)

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nur Setyaji Prajoko

Nim : 21520095

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur" adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 April 2025

Yang Membuat Pernyataan



Nur Setyaji Prajoko

NIM: 21520095

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Nur Setyaji Prajoko
NIM : 21520095
Telp : 081229965603
Email : setyajii2003@gmail.com
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dengan ini memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur”

(Studi Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Embung Desa Di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 23 Maret 2025

[illegible]

Nur Setyaji Prajoko

NIM: 21520095

MOTTO

“Jangan menyerah sebelum mendapatkan yang terbaik”
(Setyaji Prajoko)

“Walaupun mustahil, lebih baik mencoba & gagal dari pada diam dan tidak melakukan apapun”
(Coki Pardede)

“Akan tiba waktunya kamu menoleh kebelakang dan tersenyum bahwa kamu telah berhasil melewati masa sulitmu”
(Yono Bakri)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(QS. Al-Insyirah: 5)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas kasih sayang dan rahmat-Nya, sehingga alhamdulillah tugas tanggung jawab telah terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua tercinta saya yakni Bapak Wardo dan Ibu Wahyuni, dengan segala pengorbanan, kerja keras, doa, dan dukungan di setiap langkah perjalanan sampai di titik ini. Meskipun mereka tidak bisa merasakan pendidikan sampai perkuliahan, mereka tidak pernah lelah memberikan yang terbaik untuk saya. Terimakasih telah mengantarkan saya sampai mendapatkan gelar sarjana. Saya persembahkan karya tulis sederhana ini untuk orang tua tercinta.
2. Ony Fatimah dan Adik Asta yang selalu memberikan semangat dan hiburan kepada peneliti.
3. Seluruh keluarga besar saya yang berada di Purwokerto. Terima kasih atas doa dan dukungannya selama proses penulis dalam mengerjakan tugas akhir.
4. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan STPM D “APMD” yang telah memberikan ilmu dan pengalaman. Terutama Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi yang berharga dalam penyelesaian tugas akhir ini.

5. Teman-teman dan sahabat seperjuangan yang telah memberikan dukungan dalam suka maupun duka, serta berbagi pengalaman selama masa studi.
6. Terakhir, terima kasih kepada seorang laki-laki sederhana yang memiliki impian besar, namun kadang sulit dimengerti apa yang sedang di pikirkannya, yaitu saya sendiri sebagai penulis, Nur Setyaji Prajoko. Terima kasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa semua rintangan akan terlewati. Semoga menjadi orang yang beruntung di dunia maupun akhirat dan semoga Allah meridhoi setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungannya.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmatnya, sehingga penulis telah menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur” dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, bahwa tanpa adanya dukungan dan arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penulisan tugas akhir ini tidak dapat terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, penulis menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta dan sekaligus dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si. Selaku dosen penguji I yang telah memberikan arahan serta masukan kepada penulis
4. Dr. RY. Gembong Rahmadi, S.H., M. Hum. Selaku dosen penguji II yang telah memberikan arahan serta masukan kepada penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah mendidik dari semester awal sampai semester akhir perkuliahan untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang luas.

6. Pemerintah desa dan masyarakat Desa Karangnanas yang telah berpartisipasi memberikan informasi yang sangat berharga dalam proses penelitian ini.
7. Seluruh teman-teman yang sudah membantu serta memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran dari pembaca kepada penulis untuk bahan sebagai evaluasi dalam pengembangan untuk riset dimasa mendatang.

Yogyakarta, 21 April 2025

Yang Membuat Pernyataan



Nur Setyaji Prajoko

NIM: 21520095

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
INTISARI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Fokus Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. <i>Literatur Review</i>	10
G. Kerangka Konseptual	16
1. Pemerintah Desa	16
2. Pengelolaan	26
3. Pembangunan	35
4. Pembangunan Infrastruktur	42
H. Metode Penelitian	55
1. Jenis Penelitian	55
2. Objek Penelitian	56
3. Subjek Penelitian	57
4. Teknik Pengumpulan Data	57
5. Teknik Analisis Data	60
BAB II PROFIL DESA KARANGNANAS KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS	63
A. Kondisi Geografis	63

B. Kondisi Infrastruktur	64
C. Infrastruktur Dalam Perekonomian	67
D. Kondisi Wilayah.....	68
E. Kondisi Pemerintah Desa Karangnanas	70
BAB III PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN	
INFRASTRUKTUR EMBUNG	77
A. Peran Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Embung Desa..	77
B. Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Embung Desa...	85
C. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Embung Desa...	99
D. Peran Pemerintah Desa Dalam Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Embung Desa	104
BAB IV PENUTUP	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN.....	123
<i>Interview Guide (Panduan Wawancara)</i>	124
Surat Tugas Penelitian	126
Surat Permohonan Izin Penelitian	127
Surat Balasan Penelitian.....	128
Surat Penunjukan Dosen Pembimbing	129
Dokumentasi Informan Penelitian	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Informan	57
Tabel 2.1 Pendidikan	64
Tabel 2.2 Tempat Ibadah	65
Tabel 2.3 Agama.....	65
Tabel 2.4 Tempat Olahraga	66
Tabel 2.5 Tempat Kesehatan.....	66
Tabel 2.6 Pemerintah Desa.....	70
Tabel 2.7 Badan Permusyawaratan Desa	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kondisi Embung	69
Gambar 2.2 APBDes Karangnanas Tahun Anggaran 2025	75

INTISARI

Penelitian ini mengkaji secara mendalam peran pemerintah desa dalam konteks pengelolaan pembangunan infrastruktur, khususnya embung, di Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Pemerintah Desa terhadap pengelolaan dalam proyek pembangunan infrastruktur serta dampaknya untuk kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, kinerja pemerintah desa dalam pembangunan dihadapkan dengan suatu kendala, seperti kurang efektifnya proses pembangunan embung karena rendahnya SDM pada masyarakat sehingga keterbatasan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu bagaimana pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur embung?.

Penelitian ini menggunakan perspektif Government dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan melibatkan informan meliputi kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data diawali dengan mengumpulkan informasi dan mengkaji data secara sistematis kemudian mereduksi data untuk mengambil bagian intinya, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk sebuah tulisan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Peran Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan infrastruktur embung desa melalui forum Musrenbangdes, melihat dari skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat sehingga dilaksanakan adanya pembangunan embung. 2) Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur embung desa sudah dilaksanakan secara terstruktur yang melibatkan peran pemerintah desa dan dibantu oleh BPD, namun masih kurang dari segi partisipasi masyarakat, sehingga masih sangat minim ketransparansian. 3) Peran Pemerintah Desa dalam pengawasan pembangunan infrastruktur embung desa sudah termasuk efektif, namun kolaborasi antara pemerintah desa dengan masyarakat masih sangat terbatas sehingga mengurangi rasa kepemilikan terhadap pembangunan. 4) Dalam evaluasi pembangunan infrastruktur embung desa dilakukan secara berkala, tetapi tidak melibatkan BPD dan masyarakat dalam evaluasi tersebut.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Pengelolaan, Pembangunan, Pembangunan Infrastruktur

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan upaya terencana untuk mendorong pertumbuhan dan perubahan fisik sebagai bagian dari program nasional yang bertujuan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan makmur secara merata di seluruh Indonesia. Namun tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai karena masih adanya sikap apatis dari masyarakat terhadap proses pembangunan yang berlangsung. Oleh karena itu, investasi dalam pembangunan infrastruktur desa memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional karena berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 tentang Desa, yang menegaskan bahwa tujuan utama pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, serta mengurangi angka kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan pedesaan merupakan sebuah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masyarakat secara menyeluruh, dengan fokus pada pengembangan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh wilayah pedesaan. (Adisasmita,) dalam (Harahap, R., & Sagala, M. S. 2024).

Selanjutnya Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang dimana perubahan utama meliputi pengesahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun dan dapat menjabat maksimal dua kali secara berturut-turut, selain itu juga mengatur pembangunan infrastruktur untuk penanggulangan kesenjangan sosial, mengatur hak desa di kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan kebun produksi untuk mendapatkan dana konservasi atau rehabilitasi.

Pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, memiliki tanggung jawab bersama dalam menjalankan fungsi pemerintahan, khususnya dalam pembangunan infrastruktur embung untuk memastikan hasil yang optimal dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam pengelolaan dana dari pemerintah pusat, pemerintah desa berperan dengan melibatkan lembaga masyarakat, lembaga desa, serta seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa. Dalam pembangunan infrastruktur embung ini, pemerintah desa sebelum melakukan pembangunan harus mengetahui terlebih dahulu apa saja permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Dengan cara ini, pembangunan infrastruktur embung yang direncanakan tidak hanya akan memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga dampak positif yang berkelanjutan sehingga proses pembangunan tepat sasaran dan dapat terencana dengan baik serta memberikan dampak baik terutama bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan partisipatif ini akan menciptakan rasa memiliki dan

tanggung jawab bersama, sehingga infrastruktur yang dibangun sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Strategi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur, terutama dalam pengelolaan dana dari pemerintah pusat, menekankan pentingnya keterlibatan lembaga desa dan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah Desa berupaya memastikan pelaksanaan dan perencanaan program pembangunan infrastruktur dilakukan secara kolaboratif untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas desa. (Hilman, Y. A., & Asmoro, Y. R, 2020)

Oleh karena itu, peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur embung memiliki dampak signifikan terhadap kelancaran proses perencanaan pembangunan desa. Sebagai wilayah administratif yang menjalankan fungsi koordinasi di tingkat kecamatan, desa tidak dianggap sebagai wilayah kekuasaan melainkan sebagai perpanjangan tugas dari pemerintah kabupaten atau kota. Dalam pelaksanaannya, peran pemerintah desa terbagi menjadi empat aspek utama. Pertama, sebagai regulator, pemerintah desa bertugas menetapkan kebijakan dan peraturan yang mengarahkan penyelenggaraan pembangunan agar berjalan seimbang. Kedua, sebagai dinamisator, pemerintah desa berperan mendorong partisipasi berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Ketiga, sebagai fasilitator, pemerintah desa menciptakan kondisi yang mendukung dengan menyediakan fasilitas khusus untuk mengoptimalkan pelaksanaan program. Keempat, sebagai katalisator, pemerintah desa membantu menciptakan situasi yang kondusif, menjembatani

berbagai kepentingan masyarakat, dan mendorong optimalisasi pembangunan daerah. (Ryaas Rasyid & Muhadam Labollo) dalam (Rafiq, M, 2019)

Pengelolaan pembangunan infrastruktur embung desa memainkan peranan penting dalam meningkatkan ketahanan sumber daya air dan mendukung kegiatan pertanian lokal. Embung, sebagai wadah penampung air, berfungsi untuk memenuhi kebutuhan irigasi, menyediakan air bersih, serta mengurangi risiko banjir. Dalam konteks ini, pemerintah desa memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan embung yang berkelanjutan.

Dengan adanya desentralisasi, pemerintah desa memperoleh otonomi yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur. Kewenangan ini memberikan kesempatan bagi desa untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Aspek keberlanjutan lingkungan harus diperhatikan dalam pembangunan embung. Pemilihan lokasi, desain, dan teknik konstruksi yang ramah lingkungan akan memastikan bahwa embung dapat berfungsi secara optimal tanpa merusak ekosistem setempat. Dengan pendekatan ini, pemerintah desa dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan.

Pengawasan dan akuntabilitas juga merupakan faktor penting dalam pengelolaan pembangunan embung. Pemerintah desa harus menerapkan sistem pengawasan yang transparan untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan digunakan dengan efisien. Masyarakat perlu diberdayakan untuk

berpartisipasi dalam proses pengawasan agar tercipta kepercayaan antara pemerintah desa dan warganya.

Studi tentang pengelolaan pembangunan embung sangat relevan dalam konteks kebijakan nasional terkait ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya air. Memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa akan membantu dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran dan tantangan pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan embung, serta merumuskan strategi yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan proyek. Dengan pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan embung, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang memperkuat kapasitas pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

Dengan membangun ketahanan yang kuat dalam pengelolaan pembangunan embung, pemerintah desa dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur embung yang efektif dan berkelanjutan akan mendukung ketahanan pangan, meningkatkan akses air bersih, dan memperkuat daya saing ekonomi di tingkat desa.

Pembangunan harus dirancang sebagai proses pemberdayaan masyarakat dengan mengutamakan konsep kemandirian, di mana masyarakat dan individu berperan sebagai subjek pembangunan. Hal ini penting mengingat kegagalan program pembangunan pedesaan sebelumnya sering kali disebabkan

oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan infrastruktur. Dalam konteks pembangunan infrastruktur desa, pendekatan berbasis masyarakat sangat diperlukan untuk menumbuhkan semangat partisipasi aktif selama pelaksanaan program. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan pengelolaan potensi lokal yang melibatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara optimal, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat desa. (Endah, K. 2020)

Pembangunan infrastruktur desa sangat penting, karena dengan adanya program pembangunan infrastruktur akan menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja dari pemerintah desa dalam membangun desa untuk masyarakat Sejahtera. Pembangunan infrastruktur di Desa Karangnanas yaitu embung merupakan tempat penampungan air yang terletak di daerah persawahan mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat, dikarenakan mayoritas masyarakat Desa Karangnanas bekerja sebagai petani dan membutuhkan banyak air untuk kebutuhan tanaman para tani. Dengan adanya embung desa maka kebutuhan air petani akan tercukupi dan berpengaruh terhadap hasil panen sehingga terciptanya masyarakat lebih sejahtera. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial, sebagian besar dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang memadai dapat mendukung peningkatan pendapatan warga desa dan mempermudah mobilitas masyarakat. (Fajri, L. M. N. 2017)

Mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kondisi sosial masyarakat desa, yang menjadi mayoritas penduduk di Indonesia, diperlukan kerjasama yang terintegrasi antara tiga elemen utama, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat desa. Dalam Pembangunan infrastruktur desa dapat meningkatkan keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan infrastruktur pemerintah Desa Karangnanas belum dapat tercapai secara maksimal, dikarenakan program pembangunan yang seharusnya melibatkan masyarakat lokal. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keamanan dan keterlibatan mereka dalam pembangunan menjadi langkah krusial. Melalui kerja sama dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, proses pembangunan infrastruktur dapat berjalan lancar, sesuai perencanaan, dan mencapai tujuan yang diharapkan. (Fajri, L. M. N. 2017).

Suatu pembangunan akan mencapai hasil yang maksimal dan bermanfaat jika benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memastikan keberhasilan ini, terutama dalam pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat sangat penting, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi hasil akhir. Ketika masyarakat dilibatkan, mereka akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan karena turut berpartisipasi dalam kebijakan dan prosesnya. Tanpa keterlibatan masyarakat, pemerintah desa hanya menjadikan mereka sebagai penonton atau objek pembangunan. Oleh karena itu, menjadikan masyarakat sebagai subjek

pembangunan sangat penting agar mereka dapat berperan aktif dalam proses pembangunan infrastruktur di desa.

Oleh karena itu, bagaimana Pemerintah Desa melakukan upaya pengelolaan pembangunan infrastruktur embung desa dalam program pembangunan infrastruktur di desa. Berguna untuk salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat untuk mencukupi kehidupan sehari-hari sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini didasarkan pada konsep (G1) Government. Melihat dari peran, tugas, dan fungsi Pemerintah Desa. Jadi, government dalam ilmu pemerintahan merujuk pada peran Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengaturan kegiatan pemerintah yaitu pembangunan infrastruktur embung di Desa Karangnanas untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, peneliti memiliki ketertarikan untuk melaksanakan riset dengan mengangkat judul:

“Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan Infrastruktur” (Studi Peran Pemerintah Desa dalam pembangunan embung di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur embung di Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas?”

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini meliputi:

1. Peran Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan embung desa
2. Peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan embung desa
3. Peran Pemerintah Desa dalam pengawasan pembangunan embung desa
4. Peran Pemerintah Desa dalam evaluasi pembangunan embung desa

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman dan menggambarkan peran pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan pembangunan infrastruktur, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dalam pembangunan infrastruktur embung di Desa Karangnanas.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan khususnya bagi pemerintah desa terkait pembangunan

infrastruktur di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Praktis

1. Manfaat praktis penelitian ini dapat membantu pemerintah desa terkait perencanaan proyek infrastruktur yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Manfaat praktis penelitian ini dapat meningkatkan atau mendorong keterlibatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur, sehingga pembangunan yang dilaksanakan lebih relevan dan diterima oleh masyarakat.

F. *Literatur Review*

Dalam literatur review, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Adam Hilman dan Yusuf Redi Asmoro dalam jurnal Administrasi Pemerintahan Desa V1.i2 Agustus pada tahun 2020, yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Melakukan Praktik Pembangunan Infrastruktur”. Hasil penelitian ini menggambarkan dampak yang signifikan dari administrasi desa dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat melalui pendekatan perencanaan partisipatif dan tata kelola yang transparan. Hal ini pada akhirnya berkontribusi secara substansial terhadap kesejahteraan keseluruhan desa. (Hilman, Y. A., & Asmoro, Y. R. 2020)

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sarah Simbolon, Julita Sari, Yowisa Yolanda Purba, Nurtia Indah Siregar, Risa Salsabila dan Yohana Manulang. Pada jurnal Kewarganegaraan Volume 5 Nomor 2 Desember tahun 2021 yang berjudul “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur”. Penelitian ini menekankan signifikansi pemberdayaan masyarakat, tata kelola yang efisien, dan perencanaan strategis dalam mencapai keberhasilan pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Temuan menunjukkan bahwa penanganan tantangan yang teridentifikasi adalah penting untuk meningkatkan efektivitas keseluruhan pemerintah desa dalam memfasilitasi pembangunan komunitas. (Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. 2021)
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rifqah Harahap, Maduma Sari Sagala. Pada jurnal ekonomi Volume 13, No.1 tahun 2024 yang berjudul “The effect of village fund management on infrastructure development in Tanjung Putus village, Pegajahan district, Serdang Begadai regency”. Penelitian ini menjelaskan tentang Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan pelaksanaan nasional agar Pembangunan infrastruktur perkotaan dan pembangunan wilayah serta pedesaan semakin seimbang dan harmonis, pembangunan infrastruktur merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi, lokomotif pembangunan nasional yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pengelolaan Dana Desa memiliki dampak

signifikan terhadap pembangunan infrastruktur, di mana transparansi dalam penggunaan dana desa berperan penting dalam memastikan bahwa hasil pembangunan infrastruktur sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan, serta berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. (Harahap, R., & Sagala, M. S. 2024).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yoga Hariyanto, Shulis, Figur Adhiyakam. Pada jurnal pendidikan sosiologi dan humanuira volume 12 nomor 1 tahun 2021 yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur”. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mendeskripsikan Pembangunan infrastruktur yang ada di desa Kalimas, Kec. Sungai kakap Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggambarkan bahwa pemerintah desa Kalimas telah mengambil langkah-langkah signifikan dalam pengembangan infrastruktur, yang secara positif memengaruhi kualitas hidup masyarakat dan menciptakan peluang ekonomi. Namun, di sisi lain, mereka juga menghadapi tantangan yang memerlukan penerapan strategi adaptif untuk mengatasinya. (Hariyanto, Y. 2021).
5. Penelitian yang dilakukan oleh Lalu Moh. Nazar Fajri, SE., MPA. Pada jurnal SIKAP Volume 1 No. 1 tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa”. Penelitian ini menjelaskan bahwa pengembangan infrastruktur jalan secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan mata pencaharian masyarakat di Desa Jenggala, dengan partisipasi publik dan faktor sosial ekonomi memegang peranan krusial dalam perbaikan

tersebut. Pendekatan kualitatif yang digunakan memberikan wawasan berharga mengenai perspektif dan pengalaman masyarakat terkait dengan transformasi infrastruktur yang terjadi. (Fajri, L. M. N. 2017)

6. Penelitian yang dilakukan oleh Heppy Sondakh, Micaehl Mantiri, Ventje yang berjudul Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tondei Kec. Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan dalam Jurnal Governance Volume 1 Tahun 2021. Penelitian ini menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dalam menunjang kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, terutama di wilayah pedesaan Indonesia. Diketahui bahwa masih banyak desa yang menghadapi kekurangan infrastruktur memadai, seperti jalan, yang menjadi kendala utama dalam upaya pembangunan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa tata kelola yang baik dan pengelolaan infrastruktur yang efektif berperan signifikan dalam mendorong kemajuan pembangunan pedesaan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia. (Sondakh, H., Mantiri, M., & Kasenda, V 2021).
7. Penelitian yang dilakukan oleh John Buni Mesa, Hernius Ratu Udju yang berjudul Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Soba Rade Dan Desa Puu Mawo, Kabupaten Sumba Barat (UU No. 6 Tahun 2014) dalam Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Volume 4 Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah mencapai beberapa kemajuan dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam merancang

dan melaksanakan pembangunan infrastruktur desa secara optimal. Temuan ini menekankan pentingnya meningkatkan koordinasi, memperkuat keterlibatan masyarakat, serta mendistribusikan peran secara efektif di antara perangkat pemerintah desa untuk mendukung peningkatan pembangunan infrastruktur di wilayah desa. (Mesa, J. B. 2023).

8. Penelitian yang dilakukan oleh Irmansyah, Sri Wahyuni Mustafa, Rahmad Solling Hamid yang berjudul Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur dalam Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Volume 4 Tahun 2021. Penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Rompu dinilai telah berjalan secara efektif. Penilaian tersebut didasarkan pada berbagai kriteria, seperti pelaksanaan yang sesuai, pencapaian target yang selaras, kepatuhan terhadap kebijakan, serta perhatian terhadap aspek lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana dana desa digunakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan apakah pemanfaatannya memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur desa. (Irmansyah, I., Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. 2021)
9. Penelitian yang dilakukan oleh Karmila Akib, Olfy Alfionta Tepare yang berjudul Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Malitu Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Poso dalam Jurnal Ilmiah Administratie Volume 8 Tahun 2017. Penelitian ini menjelaskan Peran Pemerintah Desa Malitu dalam pembangunan infrastruktur jalan dinilai kurang efektif, terutama dalam aspek pengawasan. Hal ini terlihat

dari belum terselesaikannya jalan akses produksi. Pemerintah menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan alat komunikasi yang menghambat koordinasi yang optimal. Selain itu, banyak perangkat desa yang kurang mahir menggunakan komputer, padahal keterampilan tersebut sangat diperlukan dalam pelaksanaan administrasi modern. Meskipun pemerintah aktif dalam tahap perencanaan dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah, implementasi proyek sering kali tidak berjalan dengan baik. Studi ini mengungkapkan bahwa kunjungan pejabat pemerintah ke lokasi kerja cenderung singkat, sehingga pengawasan dan komitmen para pekerja menjadi kurang maksimal. (Akib, K., & Tepar, O. A. 2020)

10. Penelitian yang dilakukan oleh Marina Wulandari Intelman yang berjudul Dampak Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa, Pemberdayaan Masyarakat dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Tahun 2024. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengelolaan dana desa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan dana desa yang baik terbukti berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini mencatat peningkatan partisipasi warga dalam inisiatif tata kelola dan pembangunan desa, yang menandakan adanya keterlibatan dan rasa memiliki yang lebih kuat di antara masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa, pemerintah desa telah menerapkan mekanisme pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan,

temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan dana desa dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. (Intelman, M. W., & Idayati, F. 2024)

Jadi, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain dalam penelitian sebelumnya membahas Pemerintah Desa dalam ketransparansian penggunaan dana untuk pembangunan, sedangkan penelitian ini meneliti tentang bagaimana pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur embung yang ada di Desa Karangnanas. Penelitian ini juga didasarkan pada konsep G1 (Government). Melihat dari sudut pandang peran, tugas, dan fungsi pemerintah desa dalam mengelola desanya.

G. Kerangka Konseptual

1. Pemerintah Desa

Pemerintah desa, yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat desa. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip Bhineka Tunggal Ika. Dalam konteks kehidupan bernegara, keberadaan pemerintahan sangat penting untuk mengatur, melindungi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Setiap wilayah di Indonesia memiliki struktur pemerintahan yang dimulai dari

tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat. (Sugiman, S. 2018)

Dalam Undang-Undang terbaru yaitu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, dijelaskan bahwa definisi pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan kepentingan masyarakatnya dalam sebuah sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara fundamental, pemerintah desa mempresentasikan seperti kepala desa beserta para perangkatnya dalam rangka mengurus hajat hidup orang banyak. Selain itu, terdapat lembaga perwakilan desa seperti badan permusyawaratan desa yang menjadi wadah aspirasi masyarakat.

Pemerintahan terdiri dari dua peran utama yaitu fungsi dasar dan fungsi regulasi. Fungsi dasar pemerintah berfungsi untuk memberikan pelayanan publik yang bermutu, memelihara ketertiban, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan keterampilan dan kreativitas masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Sedangkan fungsi regulasi mengacu pada perumusan kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas negara dan mendorong pertumbuhan sejalan dengan tujuan nasional. Kedua fungsi ini saling mendukung untuk menjamin ketertiban dan efisiennya pemenuhan kebutuhan masyarakat. (Sari, 2022)

Pemerintah desa sebagai ujung tombak pembangunan di tingkat desa memainkan peran sentral dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek-proyek infrastruktur. Sebagai pelaksana kebijakan

pembangunan, pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur yang mendesak sesuai dengan kondisi lokal, merancang program pembangunan, serta melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan. Perencanaan ini biasanya dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk memastikan bahwa proyek yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga desa. (Waruwu, M. H., & Halawa, O. 2024).

Menurut (Yunanto, S. E. (2021), Government merupakan institusi pemegang kedaulatan rakyat bersama parlemen, dengan pendekatan institusioalisme bisa digunakan untuk mengkaji relasi pemerintah dengan negara, daerah, desa, swasta, masyarakat dan lainnya dalam pemerintahan hajat hidup orang banyak.

Dari uraian diatas government sebagai institusi pemegang kedaulatan rakyat yang berkolaborasi dengan parlemen, memainkan peran krusial dalam struktur pemerintahan, dimana pendekatan institusioalisme menyediakan kerangka analisis yang mendalam terhadap interaksi antara pemerintah dan berbagai aktor, termasuk negara, daerah, desa, sektor swasta, dan masyarakat.

Dalam konteks relasi antara government dan negara, peran government sebagai wakil kedaulatan rakyat mencakup implementasi kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan kualitas kekuasaan yang memerlukan

keseimbangan antara kepentingan rakyat dan regulasi yang ditetapkan oleh negara. Interaksi government dengan pemerintah daerah dan desa, dalam kerangka desentralisasi, dipengaruhi oleh norma dan aturan yang mengatur pembagian kewenangan, di mana kolaborasi diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang kontekstual dan memastikan partisipasi masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan sektor swasta juga merupakan elemen penting, di mana government harus membangun kemitraan strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; pendekatan institusionalisme menekankan bagaimana interaksi ini dibentuk melalui regulasi yang mendukung investasi dan norma tanggung jawab sosial perusahaan. Hubungan government dengan masyarakat menjadi inti dari kedaulatan rakyat, sehingga mekanisme partisipatif yang inklusif perlu dihadirkan agar aspirasi masyarakat dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, yang pada gilirannya meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan publik.

Peran pemerintah desa juga sangat penting dalam pembangunan infrastruktur melalui berbagai program yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi jalan, jembatan, air bersih, embung, serta sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan. Infrastruktur yang baik akan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan ekonomi lainnya. Keberhasilan pembangunan infrastruktur ini bergantung pada sejauh mana pemerintah

desa dapat mengelola anggaran dan sumber daya yang tersedia dengan efektif dan efisien.

Pemerintah desa memiliki tugas untuk mengoordinasikan berbagai pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur, termasuk masyarakat, kontraktor, dan pihak swasta. Pelaksanaan proyek harus memperhatikan aspek teknis dan kualitas agar hasil yang dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, transparansi dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan tidak disalahgunakan. Pengawasan yang ketat terhadap proyek juga diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai pihak agar tujuan pembangunan dapat tercapai sesuai dengan harapan masyarakat. Selain itu, peran kontraktor dan pihak swasta dalam pelaksanaan proyek juga penting, terutama dalam hal ketrampilan teknis dan pengadaan material yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun, sehingga keberlanjutannya dapat terjamin dalam jangka panjang. Pemerintah desa, sebagai fasilitator, memiliki peran penting dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa, sehingga setiap anggota masyarakat dapat mengemukakan pendapat dan keinginan mereka terkait pembangunan infrastruktur.

Kemudian, pemerintah desa juga berperan penting dalam pengawasan terhadap proyek pembangunan infrastruktur. Selain pengawasan internal oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap jalannya proyek pembangunan. BPD bertugas untuk memastikan bahwa proyek yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disepakati. Pengawasan ini dapat melibatkan masyarakat, yang diberi kesempatan untuk memberikan masukan atau melaporkan permasalahan yang terjadi selama proses pembangunan. (Mesa, J. B. 2023)

Pemerintah desa beserta BPD melakukan pengawasan terhadap proyek pembangunan infrastruktur bertujuan untuk menjaga kualitas dan kelancaran pelaksanaan proyek. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap tahapan proyek, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian, dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan internal ini mencakup pemantauan terhadap penggunaan anggaran, pengecekan kualitas bahan dan konstruksi, serta evaluasi terhadap progres proyek. Dengan adanya pengawasan yang efektif, diharapkan dapat mencegah penyimpangan atau penyalahgunaan dana yang dapat merugikan masyarakat desa. perencanaan hingga penyelesaian, dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan internal ini mencakup pemantauan terhadap penggunaan anggaran, pengecekan kualitas bahan dan konstruksi, serta evaluasi terhadap progres proyek. Dengan adanya

pengawasan yang efektif, diharapkan dapat mencegah penyimpangan atau penyalahgunaan dana yang dapat merugikan masyarakat desa.

Menurut (Mudrajad, K. 2018) BPD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan eksternal berperan penting untuk memastikan bahwa proyek pembangunan tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan. BPD bertindak sebagai jembatan antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga bisa memberikan laporan atau masukan terkait proyek yang sedang berjalan. Sebagai lembaga yang lebih dekat dengan masyarakat, BPD memiliki posisi strategis untuk mendengarkan keluhan atau permasalahan yang muncul di lapangan. Pengawasan BPD ini memastikan bahwa pemerintah desa tidak hanya fokus pada pencapaian target fisik, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa.

Dalam konteks penelitian ini, analisis terhadap mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah desa dan BPD di Karangnanas akan memberikan gambaran mengenai efektivitas pengelolaan dalam menjaga keberhasilan pembangunan infrastruktur dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah desa perlu melakukan penilaian secara berkala untuk memastikan bahwa proyek yang telah dilaksanakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, meliputi penilaian terhadap kualitas infrastruktur, dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, serta pemanfaatannya dalam jangka panjang. Hasil evaluasi

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan selanjutnya, sehingga proses pembangunan di desa terus berkelanjutan dan semakin baik.

Peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur juga mencakup pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sekitar. Pembangunan yang tidak ramah lingkungan dapat menyebabkan kerusakan alam yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, seperti penggunaan material ramah lingkungan dan pengelolaan limbah yang baik. Pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi ekosistem dan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang (Moridu, I, & Asfahani, A. 2023). Oleh karena itu, peran pemerintah desa dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan menjadi sangat penting. Pemerintah desa harus memastikan bahwa setiap proyek pembangunan infrastruktur tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik dan sosial masyarakat, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar. Penggunaan bahan-bahan konstruksi yang ramah lingkungan, seperti bahan daur ulang atau yang memiliki dampak minimal terhadap lingkungan, merupakan salah satu langkah yang dapat diambil untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang tepat, desa dapat mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta mempercepat pembangunan ekonomi secara merata. Pembangunan infrastruktur yang berhasil akan menciptakan akses yang lebih mudah untuk masyarakat, baik dalam sektor sosial, ekonomi, maupun politik. Infrastruktur yang baik juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan pengurangan kemiskinan. Pembangunan infrastruktur yang tepat dan efektif memang memiliki potensi besar untuk mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di banyak daerah di Indonesia, perbedaan kualitas infrastruktur antara perkotaan dan pedesaan sering kali menjadi penghambat utama dalam proses pembangunan yang merata. Infrastruktur yang lebih baik dapat membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat desa terhadap berbagai layanan dan peluang, yang pada akhirnya dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi di tingkat desa. Misalnya, dengan adanya jalan yang lebih baik, akses masyarakat terhadap pasar, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan akan semakin mudah. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat memfasilitasi pergerakan barang dan jasa, yang akan meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur sangat vital dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan yang dilakukan dengan bijaksana dan terencana akan

menghasilkan dampak positif yang luas, tidak hanya dalam aspek fisik, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, untuk memastikan bahwa proyek- proyek yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang maksimal. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di desa akan dapat mendukung tujuan pembangunan yang lebih luas, baik di tingkat desa maupun di tingkat nasional.

Pemerintah desa memegang peran yang sangat penting dalam menciptakan perubahan positif bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur (Teras, D., & Zebua, D.2023). Pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan cermat, terencana, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang signifikan tidak hanya dari segi fisik, seperti fasilitas yang lebih baik, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang baik membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi yang lebih baik. Misalnya, jalan yang baik akan mempermudah transportasi, mempercepat distribusi barang, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses pasar, rumah sakit, atau sekolah.

2. Pengelolaan

Pengelolaan tidak dapat dipisahkan dari kapasitas sumber daya manusia yang ada, terutama kepala desa dan perangkat desa sebagai pelaku utama. Mereka bertanggung jawab dalam mengelola berbagai urusan administrasi, keuangan, serta program-program pembangunan yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan sumber pendanaan lainnya (AURELIA, R. 2023). Kemampuan dalam merancang perencanaan yang realistis, melakukan pengorganisasian yang efisien, serta menjalankan fungsi pengawasan yang ketat menjadi indikator utama keberhasilan pengelolaan tersebut. Selain itu, keterlibatan lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan turut menentukan kualitas tata kelola desa yang baik. Kolaborasi yang sinergis antara semua pihak akan menciptakan mekanisme kerja yang transparan, terbuka terhadap kritik, serta adaptif terhadap perubahan yang diperlukan demi kepentingan masyarakat. Pengelolaan yang dilakukan secara terbuka dan partisipatif juga akan mendorong rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan desa, sehingga mereka tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam proses pembangunan. Dengan demikian, pengelolaan desa yang dijalankan secara profesional, demokratis, dan berorientasi pada pelayanan publik akan menjadi pondasi penting dalam mewujudkan tata kelola desa yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Secara teoritis, pengelolaan memiliki dimensi penting. *George R. Terry (2016)* dalam teorinya mengungkapkan bahwa pengelolaan mencakup empat fungsi utama, yaitu:

1. Perencanaan (Planning):

Perencanaan merupakan tahap awal dan krusial dalam proses pengelolaan. Pada tahap ini, manajer atau pemimpin merumuskan tujuan yang ingin dicapai serta strategi dan langkah-langkah sistematis untuk mencapainya. Perencanaan tidak hanya berfungsi sebagai peta jalan dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi juga sebagai alat untuk mengantisipasi risiko, mengalokasikan sumber daya secara optimal, serta menyusun skala prioritas. Tanpa perencanaan yang matang, sebuah organisasi atau institusi akan berjalan tanpa arah yang jelas dan berpotensi mengalami ketidakefisienan dalam penggunaan waktu, tenaga, dan biaya.

Dalam konteks penelitian saya, yang mengkaji peran pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan embung di Desa Karangnanas, fungsi perencanaan tercermin pada upaya pemerintah desa dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Melalui musyawarah desa, pemerintah desa bersama masyarakat mengidentifikasi kebutuhan mendesak, seperti penyediaan air untuk pertanian melalui pembangunan embung. Perencanaan ini mencerminkan keseriusan pemerintah desa dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kondisi lokal dan aspirasi masyarakat, serta menyelaraskan antara kebutuhan desa

dengan sumber daya yang tersedia agar pembangunan embung benar-benar tepat sasaran.

2. Pengorganisasian (Organizing):

Pengorganisasian adalah proses menyusun struktur dan sistem kerja dalam suatu organisasi agar setiap individu mengetahui peran dan tanggung jawabnya. Dalam praktiknya, pengorganisasian meliputi pembentukan unit-unit kerja, penetapan hierarki kewenangan, pembagian tugas secara fungsional, serta pengaturan hubungan kerja antarpihak yang terlibat. Tujuan dari pengorganisasian adalah menciptakan koordinasi yang efektif antarbagian dan individu dalam menjalankan kegiatan organisasi, sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai secara optimal.

Dalam penelitian ini, fungsi pengorganisasian terlihat dari bagaimana pemerintah desa membentuk tim pelaksana pembangunan embung yang terdiri dari perangkat desa, kelompok masyarakat, dan pihak ketiga seperti kontraktor. Kepala desa berperan sebagai pengarah umum, sementara sekretaris desa dan pelaksana kegiatan anggaran bertindak sebagai pengelola teknis dan administrasi (Liani, Y., Takari, D., & Ompusunggu, D. P. 2024). Pembagian peran ini memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan proyek serta mencegah tumpang tindih tugas. Pengorganisasian yang jelas juga membantu dalam pengawasan proyek, karena setiap individu mengetahui perannya dalam proses pembangunan

serta target yang harus dicapai sesuai tahapan dan waktu yang telah ditentukan.

3. Pelaksanaan (Actuating):

Pelaksanaan adalah fungsi pengelolaan yang berfokus pada upaya menggerakkan seluruh sumber daya manusia dalam organisasi untuk melaksanakan rencana yang telah disusun. Fungsi ini melibatkan aspek kepemimpinan, komunikasi, motivasi, dan pengambilan keputusan. Seorang pemimpin atau manajer harus mampu memberikan arahan, memotivasi anggota tim, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif agar setiap individu dapat bekerja dengan semangat dan tanggung jawab tinggi. Pelaksanaan menjadi bukti nyata dari keberhasilan tahap perencanaan dan pengorganisasian sebelumnya.

Dalam penelitian saya, pelaksanaan tampak pada tahap implementasi pembangunan embung di lapangan. Pemerintah desa tidak hanya membagikan tugas kepada para pihak yang terlibat, tetapi juga secara aktif terjun dalam pengawasan harian, memotivasi warga untuk terlibat dalam kegiatan gotong royong, serta melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa pekerjaan sesuai dengan rencana (Kamarullah, M. R. 2024). Kepala desa sebagai pemimpin menjadi motor penggerak yang memastikan kegiatan berjalan lancar dan tidak menyimpang dari jadwal serta kualitas yang telah ditentukan. Keterlibatan aktif dari pemerintah desa dalam tahap pelaksanaan mencerminkan pentingnya

fungsi actuating dalam pengelolaan pembangunan desa yang partisipatif dan berorientasi pada hasil.

4. Pengawasan (Controlling):

Pengawasan merupakan proses sistematis untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan perencanaan dan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan berfungsi untuk mendeteksi kesalahan atau penyimpangan sedini mungkin agar dapat dilakukan koreksi. Pengawasan yang baik mencakup tiga aspek utama: pengukuran kinerja, perbandingan hasil dengan standar, dan tindakan korektif bila ditemukan ketidaksesuaian. Tanpa pengawasan, potensi penyimpangan dan pemborosan sangat besar, yang pada akhirnya akan menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Dalam penelitian ini, pengawasan terlihat dalam peran aktif pemerintah desa dan BPD dalam memantau pelaksanaan pembangunan embung. Pemerintah desa melakukan kunjungan rutin ke lokasi pembangunan, mencatat progres pekerjaan, serta mengadakan evaluasi mingguan bersama tim teknis dan masyarakat (Subekti, S., & Sariningrum, N. N. 2021). BPD juga dilibatkan dalam memeriksa penggunaan dana dan memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB). Masyarakat pun diberi ruang untuk memberikan masukan dan melaporkan jika terdapat ketidaksesuaian di lapangan. Model pengawasan yang melibatkan banyak pihak ini menunjukkan adanya

sistem kontrol yang transparan dan partisipatif, yang menjadi cerminan dari tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel.

Dalam praktiknya di tingkat desa, pengelolaan tidak hanya dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa, tetapi juga melibatkan lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), serta masyarakat itu sendiri. Partisipasi aktif dari masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan proses pengelolaan, karena keterlibatan warga secara langsung menciptakan rasa memiliki terhadap program pembangunan yang dijalankan. Musyawarah desa, forum diskusi warga, serta kegiatan gotong royong menjadi sarana konkret bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan kolektif ini bukan hanya mempercepat realisasi program, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan antara pemerintah desa dan warganya. Oleh karena itu, pengelolaan desa yang berhasil adalah pengelolaan yang membuka ruang dialog dan kolaborasi seluas-luasnya bagi seluruh elemen masyarakat desa.

Dalam konteks otonomi desa yang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peran pengelolaan menjadi semakin strategis karena desa kini memiliki kewenangan lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri. Hal ini menjadikan desa bukan sekadar pelaksana kebijakan dari atas, tetapi sebagai subjek pembangunan yang mampu menentukan prioritasnya

sendiri. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah desa dituntut untuk memiliki kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang mumpuni dalam merancang, menjalankan, dan mengevaluasi program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam pelaksanaannya, desa juga dituntut untuk mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), termasuk pengelolaan anggaran secara terbuka dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Jika prinsip ini dapat diterapkan dengan konsisten, maka pengelolaan desa akan berdampak nyata pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat terwujudnya kemandirian desa.

Pengelolaan yang baik akan berdampak pada meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, sebaliknya, lemahnya pengelolaan akan menimbulkan berbagai permasalahan seperti keterlambatan program, pemborosan anggaran, atau bahkan kegagalan pencapaian tujuan pembangunan (Hasanudin, H., & Budiharjo, A. A. 2021). Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang memadai dari aparat desa agar mampu mengelola segala sumber daya secara optimal. Kemampuan tersebut mencakup pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, kecakapan dalam mengatur perencanaan strategis, serta kepekaan dalam membaca kebutuhan dan dinamika sosial masyarakat. Di samping itu, kepemimpinan yang komunikatif dan solutif sangat dibutuhkan agar setiap masalah yang muncul dapat diselesaikan secara cepat dan tepat, serta mampu

membangun sinergi antara pemerintah desa dan warga dalam menciptakan suasana kerja yang harmonis dan produktif.

Selain faktor internal seperti kapasitas aparatur desa, keberhasilan pengelolaan juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti dukungan dari pemerintah kabupaten, ketersediaan regulasi yang jelas, serta kemudahan akses terhadap informasi dan teknologi (Prisanda, E., & Febrina, R. 2021). Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam membina dan mengawasi kinerja desa, memberikan pendampingan teknis, serta memfasilitasi pelatihan untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa. Di era digital saat ini, desa-desa dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam perencanaan, pelaporan, dan transparansi pengelolaan anggaran. Penggunaan sistem informasi desa secara tepat dapat mempercepat proses administrasi, mempermudah akuntabilitas publik, serta membuka akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat. Dengan demikian, sinergi antara kapasitas internal dan dukungan eksternal akan menjadi kunci utama dalam menciptakan pengelolaan desa yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.

Dengan memahami pengelolaan sebagai suatu sistem yang terstruktur, maka peran pemerintah desa menjadi sangat strategis. Tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam menggerakkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Pemerintah desa berperan sebagai pemimpin lokal yang memiliki kewenangan penuh untuk merumuskan kebijakan pembangunan berdasarkan kebutuhan nyata

warganya (Bamantyo, R. Y., & Windradi, F. 2022). Hal ini menuntut kemampuan pemerintah desa untuk membangun komunikasi yang efektif, menciptakan iklim partisipatif, serta mendorong terciptanya kolaborasi antar elemen masyarakat. Pengelolaan yang efektif dan efisien akan menjadi landasan yang kuat dalam membangun desa yang maju, mandiri, dan sejahtera, karena keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari keberhasilan proyek fisik, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup, kemandirian ekonomi, dan solidaritas sosial di tengah masyarakat.

Sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat lokal, pemerintah desa memiliki tanggung jawab moral dan administratif dalam mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Afandi, M. N., Anomsari, E. T., & Novira, A. 2022). Artinya, setiap program dan kebijakan yang diambil harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk itu, integritas dan transparansi menjadi nilai dasar yang harus dipegang dalam setiap proses pengelolaan. Pemerintah desa yang jujur, terbuka, dan konsisten dalam menjalankan tugasnya akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, yang pada akhirnya memperkuat partisipasi warga dalam pembangunan desa. Dengan pondasi kepercayaan tersebut, proses pembangunan tidak lagi bersifat top-down, tetapi menjadi proses bersama yang tumbuh dari bawah, ditopang oleh semangat gotong royong dan kepedulian kolektif terhadap kemajuan desa.

3. Pembangunan

Pembangunan merupakan proses yang dirancang secara terarah, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup serta menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Priyanto, R. 2024). Di tingkat desa, pembangunan bukan sekadar upaya peningkatan ekonomi, melainkan juga mencakup penguatan kapasitas sosial, budaya, serta ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan. Hal ini menegaskan bahwa pembangunan desa harus dipahami sebagai proses multidimensi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan, baik individu maupun kolektif. Proses ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam setiap tahap pembangunan. Dengan demikian, pembangunan desa harus diarahkan pada penciptaan masyarakat yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing.

Menurut Todaro dalam Sovita et (2016), pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi nasional, serta percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pemberantasan kemiskinan. Konsep ini menekankan bahwa pembangunan tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari kemampuan suatu masyarakat untuk mengalami transformasi sosial yang menyeluruh. Perubahan pola pikir, nilai-nilai kehidupan, dan tata kelola kelembagaan menjadi bagian integral dari proses pembangunan yang sejati. Oleh karena

itu, pembangunan harus mampu menciptakan tatanan sosial yang lebih adil, demokratis, dan partisipatif, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Pendekatan pembangunan yang demikian menempatkan masyarakat sebagai pusat dari setiap kebijakan dan program, bukan sekadar sebagai objek, tetapi sebagai subjek aktif yang turut menentukan arah perubahan.

Dalam konteks pembangunan desa, pendekatan multidimensional ini sangat relevan untuk diterapkan. Masyarakat desa kerap menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, hingga minimnya peluang kerja yang layak. Oleh karena itu, pembangunan di desa tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas atau meningkatkan angka statistik ekonomi, tetapi juga harus menjawab kebutuhan dasar manusia secara holistik. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembentukan karakter menjadi strategi penting dalam membangun kemandirian desa. Dengan meningkatkan kapasitas warga desa secara menyeluruh, pembangunan dapat menjadi sarana transformasi yang membawa perubahan positif dan berkelanjutan bagi kehidupan mereka.

Pembangunan di desa harus dilandaskan pada prinsip-prinsip partisipatif, yaitu masyarakat terlibat aktif dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan (Kartika, R. S. 2012). Partisipasi masyarakat bukan hanya formalitas,

melainkan menjadi inti dari keberhasilan suatu program pembangunan. Dengan keterlibatan langsung, masyarakat dapat menyuarakan kebutuhan riil yang mereka alami, sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kondisi dan harapan lokal. Dalam hal ini, musyawarah desa berperan sebagai ruang demokratis di mana semua elemen masyarakat, baik tokoh adat, pemuda, perempuan, hingga kelompok rentan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Melalui proses ini, rasa kepemilikan terhadap program pembangunan akan tumbuh, sehingga masyarakat tidak hanya mendukung, tetapi juga turut menjaga keberlanjutan hasil pembangunan tersebut.

Pembangunan yang berkelanjutan menjadi orientasi utama dalam pembangunan desa. Artinya, setiap kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang dan mendatang. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestariannya, agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan atau ketimpangan sosial yang merugikan masyarakat di masa depan. Pembangunan berkelanjutan juga mengharuskan adanya keterlibatan semua pihak dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat (Manuputty, F., Loppies, 2023). Oleh karena itu, kebijakan pembangunan desa harus bersifat inklusif, responsif terhadap keragaman lokal, serta dilengkapi dengan sistem monitoring dan evaluasi

yang terukur agar pelaksanaannya dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan dinamika yang ada.

Dalam implementasinya, prinsip pembangunan berkelanjutan di desa dapat diwujudkan melalui berbagai program nyata, seperti pengelolaan sampah berbasis komunitas, pertanian ramah lingkungan, pemanfaatan energi terbarukan, dan pemberdayaan ekonomi lokal yang adil. Program-program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung secara ekonomi, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan memperkuat kohesi sosial. Selain itu, kolaborasi antar sektor dan antar desa juga dapat menjadi strategi penting untuk memperluas dampak pembangunan yang berkelanjutan. Dukungan dari pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta juga dibutuhkan agar desa memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai dalam mengembangkan inisiatif keberlanjutan. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, desa dapat menjadi pelopor dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan.

Salah satu tantangan dalam pembangunan desa adalah keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan (Pamungkas, I. D., & Durya, N. P. M. A. 2024). Banyak desa yang belum memiliki tenaga terampil atau aparat yang memahami perencanaan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan program secara efektif. Di sisi lain, ketergantungan pada dana desa dari pemerintah pusat sering kali membuat

desa kurang mandiri dalam mencari alternatif pembiayaan. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dalam tata kelola pembangunan desa, misalnya melalui kerja sama antar desa untuk menggabungkan sumber daya, pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi dan pelayanan publik, serta optimalisasi potensi lokal seperti pertanian, pariwisata, atau kerajinan khas desa. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengatasi keterbatasan, tetapi juga mendorong desa untuk lebih kreatif, adaptif, dan mandiri dalam membangun dirinya.

Inovasi dalam pembangunan desa juga dapat diwujudkan melalui penguatan kelembagaan lokal dan penciptaan ekosistem kewirausahaan yang berbasis masyarakat. Misalnya, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola secara profesional dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus sumber pendapatan asli desa (Pradani, R. F. E. 2020). BUMDes yang sukses biasanya mampu mengembangkan unit usaha yang sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan masyarakat, seperti toko desa, usaha simpan pinjam, pengelolaan wisata, atau produksi hasil pertanian. Selain itu, kemitraan dengan perguruan tinggi, LSM, dan sektor swasta dapat membuka akses pelatihan, teknologi, dan pasar yang lebih luas bagi masyarakat desa. Dengan mengembangkan pola-pola inovatif dan kolaboratif semacam ini, desa akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan pembangunan di era yang terus berubah.

Secara keseluruhan, pembangunan desa merupakan salah satu pilar utama dalam upaya pembangunan nasional. Sebagian besar penduduk

Indonesia tinggal di wilayah pedesaan, sehingga kemajuan desa akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara nasional. Pembangunan desa yang berhasil akan berkontribusi besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, pendidikan yang layak, kesetaraan gender, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, serta ketahanan terhadap perubahan iklim (Humanika, E., Trisusilo, A., & Setiawan, R. F. (2023). Oleh karena itu, setiap program dan kebijakan pembangunan di desa harus dirancang secara inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada hasil yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa menjadi sangat penting agar visi pembangunan nasional dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat akar rumput.

Pembangunan desa juga berperan dalam menjaga ketahanan sosial dan budaya bangsa. Desa sebagai entitas sosial menyimpan kekayaan nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, dan solidaritas yang dapat menjadi modal sosial dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi. Dengan menjaga dan mengembangkan identitas budaya lokal, pembangunan desa tidak hanya berfokus pada aspek material semata, tetapi juga memperkuat jati diri dan karakter masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang menghargai nilai-nilai lokal akan menciptakan keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian. Dalam kerangka tersebut,

pembangunan desa yang berakar pada kekuatan masyarakatnya sendiri akan menjadi fondasi kokoh bagi kemajuan bangsa secara berkelanjutan.

Pembangunan desa bukan sekadar program tahunan yang bersifat rutinitas, tetapi merupakan proses transformasi sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat desa secara adil dan berkelanjutan. Proses ini menuntut adanya perubahan pola pikir, perilaku, serta tata kelola masyarakat yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Pembangunan desa yang sejati harus mampu memberdayakan masyarakat dari dalam, bukan sekadar memberikan bantuan dari luar. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari jumlah proyek yang diselesaikan, tetapi dari seberapa besar masyarakat merasa memiliki, terlibat, dan merasakan manfaatnya dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, pembangunan desa perlu terus dievaluasi, disempurnakan, dan dikembangkan agar tetap relevan dengan kebutuhan serta dinamika sosial yang terus berubah.

Tantangan pembangunan desa akan semakin kompleks seiring dengan perubahan iklim, disrupti teknologi, serta tuntutan global terhadap pembangunan yang lebih adil dan inklusif. Namun, jika desa mampu membangun kekuatannya sendiri melalui partisipasi aktif warga, pemanfaatan potensi lokal, serta pengelolaan yang transparan dan akuntabel, maka desa dapat menjadi garda depan dalam menciptakan Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan. Diperlukan komitmen semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil, untuk terus

mendukung pembangunan desa sebagai investasi jangka panjang bagi keberlanjutan bangsa. Dengan pembangunan yang berbasis pada nilai, kebutuhan riil, dan kemandirian lokal, desa akan mampu menjadi ruang hidup yang layak, bermartabat, dan penuh harapan bagi generasi masa kini dan mendatang.

4. Pembangunan Infrastruktur

Menurut (Amarty Sen 1999) pentingnya pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan kualitas hidup seperti akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur di tingkat desa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks Desa Karangnanas, pembangunan infrastruktur yang baik dapat membuka akses yang lebih luas terhadap berbagai layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, serta mempermudah mobilitas barang dan jasa. Pembangunan infrastruktur yang memadai juga berfungsi sebagai peran dalam pertumbuhan ekonomi lokal, yang pada gilirannya dapat menciptakan peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat.

Dalam konteks Desa Karangnanas, pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal yang ada. Pemerintah desa harus mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan

utama yang dihadapi oleh masyarakat, seperti perbaikan jalan, penyediaan air bersih, atau pembangunan fasilitas umum lainnya.

Pembangunan yang ada di Desa Karangnanas saat ini yaitu pembangunan infrastruktur embung, yang dimana dilihat dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Karangnanas yaitu kekeringan pada saat musim kemarau, karena mayoritas pekerja di Desa Karangnanas berprofesi menjadi petani. Pembangunan infrastruktur embung merupakan fasilitas bagi masyarakat untuk penampungan air yang berfungsi meminimalisir permasalahan pengairan terhadap persawahan tanaman padi yang ada di Desa Karangnanas.

Menurut (Kusumastuti, A. 2015) Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur adalah keberlanjutannya. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga harus mampu bertahan dalam jangka panjang dan memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat Desa Karangnanas. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur dapat dicapai dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, serta pemeliharaan yang teratur. Pembangunan infrastruktur yang berhasil dapat memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang lebih baik akan meningkatkan kualitas hidup, seperti peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Di sisi ekonomi, pembangunan

infrastruktur dapat membuka peluang ekonomi baru, mempermudah distribusi barang, serta meningkatkan produktivitas masyarakat desa. Misalnya, perbaikan jalan dan jembatan akan memperlancar arus perdagangan dan distribusi barang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan petani atau pedagang di Desa Karangnanas.

Keberhasilan pembangunan infrastruktur juga sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh prosesnya, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, proyek pembangunan akan lebih mudah diterima dan dijaga keberlanjutannya. Masyarakat yang merasa memiliki akan lebih bertanggung jawab dalam menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang sukses di Desa Karangnanas tidak hanya bergantung pada pemerintah desa, tetapi juga pada partisipasi dan komitmen masyarakat untuk menjaga dan memelihara hasil pembangunan tersebut.

Proses pembangunan infrastruktur juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan keberlanjutan sosial. Pembangunan infrastruktur yang hanya berfokus pada pencapaian jangka pendek dapat mengabaikan dampak negatif yang ditimbulkan di masa depan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur di Desa Karangnanas perlu melibatkan analisis dampak lingkungan yang dapat meminimalisir kerusakan alam serta memastikan bahwa pembangunan tidak merusak keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat.

Menurut (Bahri, E. S. 2019) keberlanjutan proyek pembangunan menjadi penting agar manfaat yang diperoleh tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat bertahan dan memberikan kontribusi jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan strategi mitigasi terhadap potensi risiko atau masalah yang dapat muncul selama proses pembangunan, baik dari sisi teknis maupun sosial. Misalnya, ketika pembangunan infrastruktur di Desa Karangnanas berhubungan dengan perubahan akses jalan atau relokasi masyarakat, maka harus ada langkah-langkah yang jelas untuk menangani potensi dampak negatif tersebut. Pemerintah desa, dengan dukungan masyarakat dan pihak terkait lainnya, harus mampu mengantisipasi dan mengelola risiko ini dengan bijaksana agar pembangunan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal.

Pembangunan infrastruktur di desa juga harus mempertimbangkan keberlanjutan dan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat menyebabkan kerusakan alam yang dapat merugikan masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, pemerintah desa perlu memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang dibangun tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga dapat dipertahankan dan dikelola dengan baik untuk jangka panjang. Misalnya, pembangunan sistem irigasi yang efisien atau pembangunan jalan yang ramah lingkungan dapat membantu

masyarakat desa dalam menghadapi perubahan iklim atau meningkatkan ketahanan pangan mereka.

Selain itu, pembangunan infrastruktur di desa tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah pusat atau daerah, tetapi juga harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Partisipasi masyarakat sangat penting agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Pemerintah desa harus mampu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui musyawarah desa atau forum lainnya. Dengan begitu, pembangunan yang dilakukan akan lebih inklusif dan memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur juga merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa proyek pembangunan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana.

Di sisi lain, dampak pembangunan infrastruktur terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sangat tergantung pada sejauh mana infrastruktur tersebut dapat mendukung kegiatan ekonomi lokal dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar. Infrastruktur yang baik, seperti jalan yang terhubung dengan pasar, akan memperlancar distribusi hasil pertanian atau produk lokal, yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Begitu pula, pembangunan fasilitas kesehatan atau pendidikan yang mudah diakses akan mendukung peningkatan

kualitas hidup masyarakat, serta membuka peluang untuk pengembangan potensi sumber daya manusia di desa.

Di samping itu, pembangunan infrastruktur di tingkat desa, seperti yang terjadi di Desa Karangnanas, harus dilaksanakan dengan pendekatan yang holistik. Ini berarti bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus mencakup tidak hanya aspek fisik, tetapi juga memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan pendekatan ini, pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan infrastruktur di desa sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi setiap tahap pembangunan. Pemerintah desa yang efektif akan mampu mengelola sumber daya yang tersedia secara optimal, menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap proses pembangunan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di Desa Karangnanas dapat berjalan dengan baik, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang lebih luas, seperti peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, seperti yang terjadi di Desa Karangnanas, juga memerlukan

pendekatan yang responsif terhadap dinamika sosial yang ada. Setiap proyek pembangunan harus memperhatikan karakteristik masyarakat desa yang beragam, baik dari segi usia, pendidikan, maupun status sosial ekonomi. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus mampu menjawab tantangan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat yang lebih rentan, seperti kelompok miskin, lansia, dan perempuan. Dalam hal ini, peran pemerintah desa sangat penting dalam memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan semua pihak tanpa ada yang terabaikan.

Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur juga dapat menjadi pendorong utama bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Infrastruktur yang baik meningkatkan daya saing desa, menciptakan lapangan pekerjaan, dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat setempat. Dengan adanya infrastruktur yang mendukung sektor-sektor ekonomi, seperti pertanian, perdagangan, dan pariwisata, desa dapat mengoptimalkan potensi ekonominya dan merasakan manfaat dari kemajuan pembangunan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di desa bukan hanya menyangkut aspek fisik semata, tetapi juga berkaitan dengan penguatan ekonomi desa yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pemabngunan infrastruktur juga menjadi instrumen penting dalam mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim. Embung, misalnya, berperan sebagai penyangga dalam mengatasi kekeringan dengan

menyediakan cadangan air. Di sisi lain, embung juga membantu mengendalikan limpasan air hujan, sehingga mengurangi risiko banjir yang dapat merusak lahan pertanian dan infrastruktur lainnya. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga infrastruktur juga harus menjadi prioritas. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih peduli terhadap pemeliharaan embung dan infrastruktur yang lainnya. Mereka akan memahami bahwa infrastruktur bukan hanya aset fisik, tetapi juga modal sosial yang mendukung kehidupan mereka secara menyeluruh.

Pembangunan infrastruktur di Desa Karangnanas juga menciptakan peluang untuk inovasi lokal. Misalnya, masyarakat dapat mengembangkan teknologi sederhana untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dari embung. Inovasi ini tidak hanya membantu mengoptimalkan manfaat embung, tetapi juga memperkuat kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya mereka. Infrastruktur seperti embung dan jalan desa menjadi simbol penting dari keberhasilan pembangunan berbasis komunitas. Keberadaan infrastruktur ini mencerminkan bagaimana sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan perubahan positif yang nyata. Desa Karangnanas kini memiliki modal besar untuk terus berkembang dengan memanfaatkan infrastruktur ini secara optimal. Pada akhirnya, infrastruktur yang terencana dan terkelola dengan baik menjadi kunci utama dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Desa Karangnanas menjadi contoh bagaimana pembangunan infrastruktur dapat

memberikan dampak yang luas, tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kualitas hidup, kesehatan, dan solidaritas sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur adalah investasi jangka panjang yang penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat desa.

Embung memiliki peran penting dalam mendukung sistem irigasi pertanian di Desa Karangnanas, yang sebagian besar warganya bergantung pada sektor pertanian. Sebagai daerah yang memiliki potensi lahan sawah yang luas, keberadaan embung menjadi solusi strategis untuk menjamin pasokan air yang stabil sepanjang tahun. Embung tidak hanya memenuhi kebutuhan air saat musim kemarau, tetapi juga mendukung keberlanjutan pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat. Di Desa Karangnanas, embung dirancang untuk menampung air hujan yang melimpah selama musim penghujan. Air ini kemudian digunakan untuk mengairi sawah, sehingga produktivitas lahan dapat tetap terjaga meskipun curah hujan menurun. Sistem ini menjadi sangat relevan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang sering kali mengganggu pola curah hujan tahunan. Keberadaan embung di desa ini juga memberikan dampak langsung terhadap stabilitas hasil panen. Sebelum adanya embung, petani di Desa Karangnanas sering mengalami kekurangan air yang menyebabkan penurunan produktivitas. Namun, dengan adanya embung, hasil panen dapat lebih terprediksi dan konsisten, sehingga meningkatkan pendapatan petani. Selain mendukung sektor pertanian, embung di Desa Karangnanas juga berfungsi sebagai cadangan air yang dapat

dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik masyarakat. Hal ini sangat membantu terutama saat terjadi kekeringan berkepanjangan. Embung menjadi infrastruktur yang mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka.

Keberadaan embung di Desa Karangnanas tidak hanya membantu stabilitas hasil panen, tetapi juga mendukung diversifikasi tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat mencoba menanam berbagai jenis tanaman yang sebelumnya sulit tumbuh karena keterbatasan air. Diversifikasi ini tidak hanya meningkatkan hasil produksi, tetapi juga memberi peluang pendapatan tambahan bagi petani, memperluas jenis komoditas yang dihasilkan oleh desa. Embung juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem lokal. Air yang ditampung di embung menjadi sumber kehidupan bagi flora dan fauna di sekitarnya, sehingga menciptakan ekosistem yang lebih beragam. Keberadaan embung turut membantu menjaga kelembapan tanah, mengurangi risiko erosi, dan memastikan kesuburan tanah tetap terjaga untuk aktivitas pertanian di masa mendatang. Selain itu, embung memberikan dampak sosial yang signifikan di Desa Karangnanas. Proses pembangunan dan pengelolaannya yang melibatkan masyarakat lokal telah memperkuat rasa gotong royong dan solidaritas warga desa. Warga tidak hanya mendapatkan manfaat langsung dari embung, tetapi juga merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga dan memanfaatkan infrastruktur ini secara bijaksana.

Di sisi lain, embung di Desa Karangnanas juga menjadi aset strategis dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Dengan pola cuaca yang semakin tidak menentu, embung memberikan solusi adaptif yang membantu masyarakat menghadapi musim kemarau panjang maupun hujan deras yang sering kali menimbulkan banjir. Fungsi ganda ini menjadikan embung sebagai infrastruktur yang tangguh dalam berbagai kondisi. Dampak positif embung tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga oleh masyarakat secara umum. Air yang tersedia di embung dapat digunakan untuk kegiatan domestik, seperti mencuci, memasak, atau bahkan sebagai sumber air bersih alternatif. Hal ini memberikan rasa aman kepada warga desa, terutama pada saat sumber air lain seperti sumur atau sungai mengering akibat musim kemarau.

Selain fungsi utamanya sebagai sumber air, embung memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi aset wisata desa. Pemandangan embung yang dikelilingi sawah dan pepohonan dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Dengan perencanaan yang matang, pengembangan wisata berbasis embung dapat memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat dan pemerintah desa. Keberlanjutan embung sangat bergantung pada perawatan yang konsisten. Pemerintah desa perlu memastikan bahwa embung selalu dalam kondisi optimal, misalnya dengan membersihkan sedimen atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi masalah besar. Partisipasi masyarakat dalam

pemeliharaan juga sangat diperlukan agar embung dapat terus memberikan manfaat jangka panjang.

Embung di Desa Karangnanas juga memiliki nilai edukasi yang tinggi. Dengan infrastruktur ini, masyarakat dapat belajar tentang pentingnya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Generasi muda desa dapat memahami bahwa embung bukan hanya sekadar infrastruktur, tetapi juga salah satu kunci untuk keberlanjutan pertanian dan kehidupan masyarakat desa secara keseluruhan. Melalui embung, Desa Karangnanas menunjukkan bagaimana infrastruktur sederhana dapat memberikan manfaat yang besar jika direncanakan dan dikelola dengan baik. Embung tidak hanya menjadi solusi teknis untuk masalah air, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan desa yang lebih luas, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pada akhirnya, embung di Desa Karangnanas menjadi simbol keberhasilan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Keberadaan embung tidak hanya memberikan manfaat langsung, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, embung ini dapat terus menjadi aset berharga bagi desa, sekarang dan di masa depan. Dari segi ekologis, embung berkontribusi pada peningkatan kualitas tanah di Desa Karangnanas. Dengan pasokan air yang cukup, tanah menjadi lebih subur dan mampu mendukung pertumbuhan tanaman

secara optimal. Selain itu, embung juga menciptakan habitat baru bagi flora dan fauna lokal, yang memperkaya biodiversitas kawasan.

Keberadaan embung ini juga mendukung program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan di wilayah pedesaan. Dengan memastikan ketersediaan air untuk irigasi, Desa Karangnanas dapat menjadi salah satu kontributor utama dalam penyediaan bahan pangan di tingkat regional. Penelitian ini menunjukkan bahwa embung tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam bentuk irigasi, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat Desa Karangnanas. Dengan memanfaatkan embung, masyarakat dapat mengembangkan berbagai inovasi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan.

Potensi embung sebagai sumber daya lokal yang strategis di Desa Karangnanas juga membuka peluang untuk kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti lembaga non-pemerintah atau institusi pendidikan. Kolaborasi ini dapat menghadirkan teknologi baru atau pendekatan yang lebih efektif dalam pengelolaan embung. Dalam konteks keberlanjutan, embung menjadi infrastruktur yang ramah lingkungan dan dapat digunakan oleh generasi mendatang. Hal ini menjadi alasan penting untuk memastikan bahwa embung di Desa Karangnanas dirancang dan dikelola dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Embung juga memiliki nilai simbolis yang mencerminkan sinergi antara teknologi dan tradisi lokal di Desa Karangnanas. Dengan memadukan pengetahuan modern dan kearifan lokal, embung menjadi bukti nyata bahwa

masyarakat desa mampu beradaptasi terhadap tantangan zaman tanpa kehilangan identitas mereka. Dengan berbagai manfaat yang telah disebutkan, embung di Desa Karangnanas tidak hanya menjadi solusi teknis untuk masalah irigasi, tetapi juga menjadi pilar pembangunan desa yang lebih holistik. Infrastruktur ini mencerminkan semangat inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan yang menjadi landasan utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan gambaran rinci mengenai suatu aktivitas atau fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berbentuk kata-kata, gambar, atau dokumen, bukan berupa angka. Sumber data diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, serta dokumen resmi lainnya. Penelitian deskriptif kualitatif ini berfokus pada pengumpulan data yang kemudian dijelaskan secara mendalam dalam bentuk narasi atau deskripsi.

Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena, baik yang bersifat alami maupun yang dihasilkan oleh interaksi manusia. Fenomena tersebut dapat mencakup beragam aspek, seperti aktivitas, karakteristik, hubungan, perubahan, kesamaan, atau perbedaan antara berbagai fenomena. Dalam konteks

penelitian deskriptif kualitatif, data disajikan secara objektif sesuai dengan kondisi yang teramati di lapangan, tanpa adanya manipulasi terhadap informasi yang diperoleh.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merujuk pada fenomena yang menjadi fokus kajian sesuai dengan target yang ditetapkan, mencakup aspek kondisi yang relevan, program, sasaran, dan wilayah tertentu. Oleh karena itu objek penelitian ini pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur di Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Permasalahan yang ada di Desa Karangnanas juga memungkinkan adanya perbedaan dengan lokasi pada penelitian yang sebelumnya.

3. Subjek Penelitian

Penelitian ini sudah dilakukan dengan deskripsi narasumber sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Informan

No	Nama	Jabatan/ pekerjaan	Usia	Tingkat Pendidikan	Tanggal Wawancara
1.	Warto	PJ Kepala Desa	55	SLTA	8-1-2025
2.	Parjoko	Kaur Keuangan	53	SLTA	3-1-2025
3.	Angga Jati W	Kaur Perencanaan	37	S1	3-1-2025
4.	Sutarno	Kasi Kesejahteraan	57	SLTA	3-1-2025
5.	Pujiono, S.Pd	Ketua BPD	52	SLTA	5-1-2025
6.	Wasun	Masyarakat	50	SLTP	12-1-2025
7.	Sudaryo	Masyarakat	59	SD	14-1-2025

Sumber: *Data Primer*, 2025

Teknik pemilihan narasumber melalui pendekatan penentuan secara langsung yang biasa disebut purposive. Subjek penelitian ini memiliki peran penting dalam riset ini, informat dapat memberikan data atau informasi terkait pembangunan embung, sehingga peneliti dapat mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian yang membahas peran pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur, teknik pengumpulan data menjadi elemen krusial untuk memahami pandangan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode observasi,

wawancara, dan dokumentasi sebagai pendekatan utama. Melalui metode tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi secara mendalam terkait permasalahan yang terjadi di lapangan. Berikut pengertian dari metode diatas:

a. Observasi

Metode observasi ini peneliti mengumpulkan informasi mengenai situasi atau permasalahan yang ada di Desa Karangnanas berdasarkan hasil pengamatan langsung oleh peneliti. Observasi dilakukan dengan mencatat kondisi dan aktivitas yang diamati secara langsung. Pada tahapan observasi ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lokasi Desa Karangnanas guna untuk melihat sejauh mana peran pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan embung yang sedang dilaksanakan.

b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data secara langsung melalui interaksi antara peneliti dan informan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, wawancara dapat dilakukan baik secara langsung melalui pertemuan tatap muka maupun secara daring melalui telepon, Zoom, atau media lainnya.

Melalui wawancara, peneliti dapat menggali berbagai informasi yang relevan dengan fokus permasalahan yang diteliti.

Pada tahapan ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap mampu memberikan informasi akurat terkait pembangunan infrastruktur embung desa, meliputi pemerintah desa dan warga Desa Karangnanas. Wawancara dengan Warto selaku PJ Kepala Desa, Parjoko selaku Kaur Keuangan, Angga selaku Kaur Perencanaan, Sutarno selaku Kasi Kesejahteraan, Pujiono selaku Ketua BPD, Wasun selaku masyarakat yang berprofesi buruh, Sudaryo selaku masyarakat yang berprofesi menjadi petani.

Dalam proses pelaksanaan wawancara terdapat perbedaan yang signifikan, dimana peneliti melaksanakan wawancara dengan informan berbeda tempat karena menyesuaikan situasi dan kondisi masing-masing informan. Sesi wawancara juga dilaksanakan pada jam dan hari yang berbeda, adanya kegiatan wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur embung yang sedang dilaksanakan, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi kendala selama proses pembangunan yang ada di Desa Karangnanas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari bukti-bukti valid yang berkaitan dengan proses penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, dokumentasi

dapat mencakup berbagai jenis dokumen, seperti kebijakan, biografi, buku harian, artikel surat kabar, makalah, dan berbagai sumber lainnya. Selain itu, dokumentasi juga dapat meliputi rekaman audio, gambar, foto, serta lukisan yang mendukung informasi yang telah dikumpulkan.

Pada tahapan dokumentasi ini, peneliti mengumpulkan beberapa data atau dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen tersebut antara lain: APBDes, foto banner, data kependudukan, data pengeluaran dana pembangunan, foto pada saat pelaksanaan wawancara, foto lokasi pembangunan embung. Dokumen yang telah didapatkan berguna sebagai referensi sekaligus alat dukung pelengkap dalam proses pengumpulan data validasi.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses proses mengorganisir data secara sistematis setelah melalui tahap observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengkategorian data, merinci informasi menjadi unit-unit kecil, memilih data yang relevan, dan menarik kesimpulan untuk memudahkan pemahaman baik bagi peneliti maupun pembaca. Secara umum, analisis data bertujuan untuk menyusun, mengurutkan, dan mengelompokkan informasi, sehingga lebih fokus dan efektif dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Analisis pada data kualitatif yang dilakukan peneliti meliputi.

a. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses seleksi, pemusatan, atau penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan. Proses ini merupakan salah satu bentuk analisis yang bertujuan untuk menajamkan, mengarahkan, serta mengeliminasi data yang tidak relevan, sekaligus mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang lebih jelas. Tahapan ini mencakup pemusatan mendalam terhadap setiap temuan yang didapatkan melalui aktivitas observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Dari proses reduksi ini, hasilnya diharapkan mampu mempertegas dan memperjelas penjabaran hasil penelitian secara lebih komperhensif.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu usaha dalam proses pengorganisasian dan penggabungan informasi ke dalam suatu matriks yang mudah dipahami. Penyajian data yang sederhana dan jelas merupakan metode utama dalam menganalisis data deskriptif kualitatif secara akurat. Dalam tahapan penyajian data, peneliti mengamati fenomena yang terjadi di lapangan, wawancara, serta dokumentasi yang telah dilaksanakan. Proses ini mencakup pemilihan data mentah yang belum terolah, dilakukan secara berkesinambungan selama penelitian. Setelah melakukan pemilihan data, peneliti menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur dalam

paragraph, tabel yang dirancang untuk mempermudah pembaca dalam memahami data, dan visualisasi dalam bentuk gambar yang bertujuan untuk memperjelas serta mempermudah mempresentasikan hasil data yang telah dilaksanakan selama penelitian.

c. Menarik Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggabungkan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi secara menyeluruh yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara akurat sekaligus memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai fokus penelitian yang dibahas. Langkah ini melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap fenomena yang terjadi di lapangan sekaligus mengembangkan teori yang bertumpu pada data yang telah terakumulasi. Selain itu, penarikan kesimpulan juga untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menyampaikan wawasan yang substansial kepada pembaca.

BAB II

PROFIL DESA KARANGNANAS KECAMATAN SOKARAJA

KABUPATEN BANYUMAS

A. Kondisi Geografis

Berdasarkan letak geografis wilayah, Desa Karangnanas di Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dengan luas wilayah 300.14 ha. Yang berada di wilayah dataran rendah di bagian selatan Kecamatan Sokaraja. Topografi 17meter diatas permukaan laut (dpl), Suhu rata rata 26°C-30°C. Wilayah Desa Karangnanas termasuk luas yang semuanya terbagi menjadi tiga Dusun yaitu Dusun I (Bagian Tengah), Dusun II (Bagian Timur) dan Dusun III (Bagian Barat) dan terdiri dari 8 RW serta 49 RT dengan luas 282.584 Ha. Adapun Batasan wilayan Desa Karangnanas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karangrau Kecamatan Sokaraja
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karangkedawung Kecamatan Sokaraja
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan

Desa Karangnanas juga mempunyai Visi dan Misi demi mencapai kesejahteraan masyarakat Desa Karangnanas sehingga mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Adapun Visi dan Misi tersebut dapat dilihat dibawah ini:

Visi: Terciptanya Desa Karangnanas yang Mandiri, Adil, Makmur, dan Sejahtera

Misi:

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang tertib dan berwibawa
2. Mewujudkan pembangunan desa yang adil dan merata
3. Mewujudkan masyarakat yang madani melalui pembinaan kemasyarakatan secara menyeluruh
4. Mewujudkan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan
5. Mewujudkan desa yang siap siaga bencana dan tanggap darurat dalam segala situasi

B. Kondisi Infrastruktur

1. Prasarana Pendidikan

Tabel 2.1 Pendidikan

No	Nama Sekolah	Jumlah
1	SD NEGERI	3
2	TK Pertiwi	1
3	TK Swasta	2
4	PAUD	2

Sumber Data: *Data Desa Karangnanas, 2024*

Pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan penelitian, Desa Karangnanas memiliki sarana prasarana pendidikan terbanyak di SD Negeri dengan 3 bangunan, sementara yang paling sedikit adalah TK Pertiwi dengan 1

bangunan. Secara keseluruhan, terdapat 8 bangunan pendidikan di desa ini, termasuk SD Negeri, TK Pertiwi, TK Swasta, dan PAUD.

2. Tempat Ibadah dan Agama

Tabel 2.2 Tempat Ibadah

No	Nama Tempat	Jumlah
1	Masjid	8
2	Mushola	29
3	Gereja	2

Sumber Data: *Data Desa Karangnanas, 2024*

Tabel 2.3 Agama

No	Kepercayaan	Jumlah
1	Islam	10.600
2	Kristen	92
3	Katholik	34
4	Hindu	2
5	Budha	5
Jumlah		10.733

Sumber Data: *Data Penduduk Berdasarkan Agama Desa Karangnanas, 2024*

Desa Karangnanas mempunyai jiwa toleransi yang sangat terjaga antar umat walaupun ada perbedaan kepercayaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Karangnanas, ada berbagai macam agama di Desa Karangnanas yang meliputi agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha, dan semua masyarakat mempunyai agama ataupun kepercayaan. Mayoritas di Desa Karangnanas yaitu masyarakat yang beragama Islam dengan 10.600 jiwa.

Berdasarkan tabel diatas juga ada beberapa tempat ibadah yang ada di Desa Karangnanas antara lain Masjid, Mushola, dan Gereja. Dari ketiga tempat ibadah tersebut bangunan mushola yang mendominasi paling banyak di Desa Karangnanas karena bangunan tersebut tidak terlalu besar seperti

Masjid dan Gereja harus menggunakan tanah yang lumayan cukup luas, sehingga mushola lebih banyak di bangun hampir setiap RW ada, karena mayoritas beragama Islam.

3. Prasarana Olahraga

Tabel 2.4 Tempat Olahraga

No	Nama Tempat	Jumlah
1	Lapangan Sepak Bola	1
2	Lapangan Bulu Tangkis	4
3	Lapangan Voli	3

Sumber Data: *Data Desa Karangnanas, 2024*

Desa Karangnanas mempunyai beberapa tempat atau fasilitas infrastruktur khusus di bidang olahraga yaitu lapangan sepak bola, lapangan bulu tangkis, dan lapangan voli. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, lapangan tersebut sering digunakan untuk olahraga bagi masyarakat Desa Karangnanas dan digunakan untuk tempat pelaksanaan event atau lomba seperti memperingati hari kemerdekaan, dan memperingati hari jadi Desa Karangnanas.

4. Prasarana Kesehatan

Tabel 2.5 Tempat Kesehatan

No	Nama Tempat	Jumlah
1	Puskesmas Pembantu	1
2	Posyandu Lansia	8
3	Posyandu Balita	12

Sumber Data: *Data Desa Karangnanas, 2024*

Pelayanan Kesehatan lebih maksimal ketika adanya fasilitas yang memadai dan untuk meminimalisir masalah kesehatan yang ada di Desa Karangnanas, seperti stanting, hipertensi, dan bahkan penyakit menular.

Dengan adanya fasilitas-fasilitas kesehatan yang mumpuni otomatis kondisi kesehatan masyarakat akan terjamin dan terhindar dari penyakit yang beresiko. Tempat pelayanan di Desa Karangnanas meliputi Puskesmas Pembantu, Posyandu Balita, dan Posyandu Lansia.

C. Infrastruktur Dalam Perekonomian

Sumber pendapatan atau mata pencaharian penduduk Desa Karangnanas sangat beragam profesi antara lain, Pegawai Negeri Sipil, Petani, Pedagang, Buruh, dan masih banyak lagi. Di Desa Karangnanas mayoritas masyarakatnya dalam mencari pendapatan untuk kebutuhan ekonominya adalah berprofesi sebagai petani. Tanaman yang di tanam oleh petani yang di Desa Karangnanas yaitu padi. Sehingga dengan adanya pembangunan Embung Desa sebagai penampungan air yang sangat dibutuhkan oleh para petani, ketika musim kemarau telah tiba sehingga tanaman padi para petani tidak mengalami kekeringan karena kekurangan air, Embung Desa berfungsi untuk mengaliri pesawahan yang isinya tanaman padi tersebut. Dan akan berpengaruh ke penghasilan hasil panen petani, dan otomatis Pemerintah Desa secara langsung membantu memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat Desa Karangnanas. Sehingga akan terciptanya peningkatan ekonomi dan tidak ada lagi yang kesusahan untuk mencukupi kehidupannya dan makan sehari-harinya.

Selain petani, masyarakat juga lumayan banyak yang pekerjaan kesehariannya menjadi buruh, buruh di desa kebanyakan sebagai kuli bangunan. Sehingga masyarakat sangat berharap ketika adanya pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Karangnanas, untuk melibatkan

masyarakatnya sendiri dibandingkan menggunakan tenaga dari luar, sehingga dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, salah satunya pembangunan infrastruktur embung desa secara langsung adanya perputaran ekonomi bagi masyarakat untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya sehingga tidak ada lagi permasalahan ekonomi di Desa Karangnanas.

D. Kondisi Wilayah

a. Kondisi Tanah

Tanah di Desa Karangnanas tergolong subur dengan jenis Tanah Aluvial, yang terbentuk dari endapan material halus akibat proses sedimentasi alami. Terletak di kawasan dataran rendah, karakteristik tanah ini sangat mendukung aktivitas pertanian, khususnya dalam budidaya tanaman padi. Optimalisasi pengelolaan lahan, termasuk penerapan strategi pemupukan yang sesuai, berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah tersebut. Dengan manajemen tanah yang tepat, potensi pertanian di Desa Karangnanas dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

b. Kondisi Sungai

Kondisi Sungai di Desa Karangnanas memiliki 3 sungai besar yaitu Sungai Bener, Sungai Tlanjik, dan Sungai Bengkelung. Sungai tersebut masih banyak difungsikan oleh masyarakat, seperti untuk mencuci pakaian, perairan kolam ikan, dan lainnya. Sungai di Desa Karangnanas sekarang sudah adanya larangan buang air besar karena setiap masyarakat harus mempunyai minimal satu jamban yang berada di dalam rumahnya. Sehingga

dapat mengurangi tercemarnya air sungai sehingga kualitas air menjadi lebih layak digunakan oleh masyarakat.

c. Lahan Pertanian

Lahan sawah atau pertanian di Desa Karangnanas cukup luas 107,808 Hektar dan kebun dengan luas 16.965 Hektar. Sehingga mayoritas masyarakat menjadi petani maupun buruh tani dan tanah di Desa Karangnanas sangat subur untuk di tanam tanaman padi.

d. Kondisi Embung

Gambar 1.1 Kondisi Embung



(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2024)

Lokasi persawahan yang terletak di Desa Karangnanas terdapat embung yang memiliki panjang 90meter dan lebar 60meter. Embung ini dibangun bertujuan untuk menampung air hujan, memberikan irigasi yang cukup untuk para petani di desa, dan mendukung ketahanan kondisi pertanian. Embung ini bukan hanya untuk sumber air bagi pertanian saja, namun akan berguna bagi masyarakat desa untuk memancing, tempat nongkrong di tepi embung. Adanya pembangunan

embung ini untuk mempererat jiwa sosial masyarakat Desa Karangnanas.

E. Kondisi Pemerintah Desa Karangnanas

1. Pemerintah Desa

Desa Karangnanas terdiri dari 3 Dusun, 8 RW serta 49 RT dengan luas 282.584 Ha. Pemerintahan Desa Karangnanas sekarang Dipimpin Oleh PJ Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa serta didampingi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Tabel 2.6 Pemerintah Desa

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Warto	PJ Kepala Desa	SLTA
2	Warsinu	Sekertaris Desa	SLTA
3	Kartun Tumiarjo	Kepala Dusun I	SLTA
4	Asyhari	Kepala Dusun II	SLTP
5	Sarikin	Kepala Dusun III	SLTA
6	Darsito	Kasi Palayanan	SLTA
7	Sutarno	Kasi Kesejahteraan	SLTA
8	Priyo Yulianto	Kasi Pemerintahan	SLTA
9	Paryono	Kaur Umum & TU	SLTA
10	Parjoko	Kaur Keuangan	SLTA
11	Angga Jati Wicaksono	Kaur Perencanaan	S1

Sumber Data: *Desa Karangnanas 2024*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pemerintah Desa Karangnanas hampir semua lulusan SLTA. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa jika dilihat dari tingkat pendidikan pada Pemerintah Desa Karangnanas masih kurang, tetapi walaupun dari segi pendidikan masih kurang, pemerintah desa masih mampu melaksanakan

tugasnya sebagai pemerintah desa dan bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa layak dalam kinerja untuk mensejahterakan masyarakat.

Selain itu, Kepala Dusun I riwayat pendidikannya hanya SLTP dan hal tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa perangkat desa “Berpendidikan paling rendah SMA atau yang Sederajat”. Hal tersebut terjadi karena masyarakat Desa Karangnanas kebanyakan kurang berminat untuk menjadi perangkat desa dikarenakan gajinya sedikit, salah satu alasan tersebut yang membuat masyarakat Desa Karangnanas kurang berminat menjadi perangkat desa. Perangkat Desa selain diukur dari segi tingkat pendidikan, mereka juga masih bisa melaksanakan tugasnya di pemerintahan desa sampai usia maksimal 60 tahun.

Setelah melakukan penelitian, sejauh ini Pemerintah Desa Karangnanas dalam segi kinerja cukup baik dalam melayani masyarakat dalam berbagai bidang meliputi administrasi, pembangunan infrastruktur, keamanan, dan lainnya. Walaupun dari tingkat pendidikan masih kurang, Pemerintah Desa Karangnanas mampu membuktikan kinerjanya.

Tabel 2.7 Badan Permusyawaratan Desa

No	Nama	Jabatan
1	Pujiono, S.Pd	Ketua
2	Slamet, S.Pd	Wakil Ketua
3	Suroso, S.Kom	Sekretaris
4	Kuat Waluyo, ST	Anggota
5	Tarsim, S.Pd	Anggota
6	Mujiyo, S.Pd	Anggota
7	Drs. Mutholi	Anggota
8	Suwarti, S.Pd	Anggota
9	Mohamad Arif Soeprapto, S.Pd	Anggota

Sumber Data: *Desa Karangnanas 2024*

Dapat dilihat dari tabel diatas, setelah peneliti melakukan penelitian mendapatkan data bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam segi pendidikan sudah cukup baik, dengan bekal ilmu dari pendidikannya diharapkan dapat mengatasi dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat Desa Karangnanas dengan bekerja sama dengan pemerintah desa.

2. Strategi Pembangunan Desa

Secara umum, strategi pembangunan yang diterapkan di Desa Karangnanas difokuskan pada percepatan kemajuan di berbagai sektor dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Potensi tersebut mencakup sumber daya manusia, sumber daya alam, serta aspek pendanaan yang dikelola secara terpadu dan berkelanjutan. Ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang menyeluruh, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mendukung kesejahteraan dan perkembangan desa dalam jangka panjang. Strategi ini disebut sebagai “Peta Jalan Menuju Kemajuan dan Kemandirian”. Meliputi:

- a. Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

- b. Meningkatkan kualitas pelayanan public dan mendorong terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar bidang Kesehatan yang berbasis masyarakat.
- d. Memperkuat dan mengembangkan basis-basis ekonomi masyarakat.
- e. Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pilar kekuatan ekonomi masyarakat.
- f. Meningkatkan kesempatan belajar yang lebih luas kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kecakapan hidup.
- g. Melaksanakan Pembangunan yang berbasis nilai-nilai keagamaan, tradisi dan kearifan lingkungan.
- h. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.

3. Program dan Kegiatan Pembangunan Desa

- 1. Program pembangunan ditekankan adanya peningkatan sarana dan prasarana desa yang meliputi:
 - a. Pembangunan Ekonomi seperti peningkatan jalan, pembangunan jembatan, dan sebagainya.
 - b. Pembangunan Pendidikan seperti Pembangunan Gedung TK, rehab Gedung sekolah, dan sebagainya.
 - c. Pembangunan Ibadah seperti pembangunan masjid atau mushola.

- d. Pembangunan Sosial seperti pembangunan prasarana air bersih, pembangunan pos kamling, pembangunan Gedung pertemuan RW dan RT, pembangunan Gedung Karang Taruna dan sebagainya.
2. Pembangunan sarana dan prasarana pemerintah, seperti rehab kantor desa dan sebagainya.
3. Program peningkatan Sumber Daya Manusia.
4. Program peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi lembaga pemerintahan maupun kemasyarakatan.
5. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Program Pembangunan pertanian dan peternakan.
7. Program peningkatan kualitas hidup.
8. Program pembinaan kesadaran kebangsaan, hukum, dan kewarganegaraan.
9. Program pembinaan kepemudaan dan olah raga.
10. Program pelestarian tradisi, seni, dan budaya.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Gambar 2.2 APBDes Karangnanas Tahun Anggaran 2025



(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)

Pada gambar banner diatas merupakan data Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2025, yang dimana terkait bidang pelaksanaan pembangunan meliputi:

- Bidang pendidikan sebesar 135.000.000
- Bidang kesehatan sebesar 408.872.500
- Bidang pekerjaan umum dan tata ruang sebesar 870.250.000
- Bidang kawasan pemukiman sebesar 140.000.000
- Bidang pariwisata sebesar 6.000.000

Jadi jumlah keseluruhan pelaksanaan pembangunan adalah 1.560.122.500

5. Masalah atau Konflik

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Karangnanas, ditemukan sejumlah permasalahan yang masih dihadapi oleh masyarakat setempat. Rincian permasalahan tersebut dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:

1. Kinerja Pemerintah Desa Karangnanas mampu melayani masyarakat di bidang administrasi, sosial dan sebagainya yang sudah diterapkan dengan baik. Walaupun kurangnya dari segi pendidikan, tetapi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa Karangnanas yaitu kurangnya memahami dalam penggunaan media elektronik, sehingga perlu adanya peningkatan SDM melalui bimbingan teknis.
2. Kurangnya staf bagian teknis di kantor desa, sehingga dalam proses penyusunan perdes tentang APBD desa, website desa, profil desa dan lainnya sehingga masyarakat kurang mengetahui informasi pemerintahan desa karena sedikit terlambat update.
3. Masih sangat rendah sumber daya manusia di Desa Karangnanas karena belum terlaui memanfaatkan dengan potensi yang ada.
4. Hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat kurang transparansi sehingga pemerintah desa masih membatasi keterlibaran masyarakat dalam pembangunan yang ada.

BAB III

PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR EMBUNG

Dalam penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan penjelasan secara rinci terkait temuan yang diperoleh pada saat penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 7 informan yang di anggap mampu menjelaskan dan memberikan data atau informasi yang akurat terkait pembangunan infrastruktur embung desa di Desa Karangnanas kepada peneliti.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dimana penulis mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan sebenarnya yang terjadi dilapangan yaitu di Desa Karangnanas, agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur.

A. Peran Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Embung Desa

Perencanaan pembangunan infrastruktur embung desa memegang peranan yang sangat penting dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Embung berfungsi sebagai wadah penampungan air hujan yang sangat penting untuk irigasi pertanian, khususnya di daerah Desa Karangnanas yang sering menghadapi masalah air pada musim kemarau. Dengan adanya ketersediaan air yang konsisten, para petani memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas hasil panen, yang secara langsung berkontribusi terhadap

kesejahteraan ekonomi komunitas. Selain itu, embung juga berfungsi untuk mengatur aliran air, sehingga mampu mencegah terjadinya bencana banjir selama periode hujan.

Keberadaan embung tidak hanya mendukung sektor pertanian, tetapi juga membuka peluang bagi usaha baru, seperti budidaya ikan dan pengembangan ekowisata, yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan. Dalam konteks perencanaan pembangunan embung, keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting agar inisiatif tersebut dapat responsif terhadap kebutuhan lokal, serta menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap infrastruktur yang telah dibangun.

Perencanaan yang matang juga memastikan bahwa pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan. Selain itu, rencana yang sistematis memudahkan pemerintah desa dalam memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun lembaga lainnya. Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur embung desa merupakan langkah strategis yang tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat akses terhadap layanan dasar serta ketahanan sosial dan ekonomi di tingkat desa.

Dengan hal ini kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Warto selaku PJ Kepala Desa:

“Kami merupakan tokoh utama yang mendengarkan langsung dari aspirasi masyarakat, sehingga kami memahami apa yang sedang mereka butuhkan. Sebelum berjalannya pembangunan, kami memulai dengan musyawarah desa untuk mengidentifikasi prioritas kebutuhan

masyarakat terkait adanya rencana pembangunan infrastruktur. Seperti pembangunan yang sedang berjalan ini yaitu embung desa, karena mayoritas warga Desa Karangnanas rata-rata mempunyai mata pencaharian sebagai petani yang dimana membutuhkan air yang cukup untuk meningkatkan efektivitas hasil pertanian”. (Wawancara 8 Januari 2025)

Hasil wawancara ini PJ Kepala Desa menjelaskan terkait pendekatan partisipatif yang penting dalam proses pembangunan infrastruktur desa, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan embung desa. Tokoh utama yang diwawancarai menunjukkan komitmen yang mendalam terhadap aspirasi masyarakat, dengan secara proaktif melibatkan mereka melalui musyawarah desa yang terstruktur. Proses musyawarah ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengidentifikasi prioritas kebutuhan masyarakat, tetapi juga sebagai platform strategis untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan mereka.

Mengamati kondisi masyarakat Desa Karangnanas yang mayoritas bergantung pada sektor pertanian, kebutuhan akan sumber air yang memadai menjadi sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang pada gilirannya berdampak pada ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Pembangunan embung desa diharapkan tidak hanya mampu menyediakan pasokan air yang cukup untuk irigasi, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks ini, dampak sosial dan ekonomi dari pembangunan embung menjadi fokus utama, mengingat bahwa keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen

masyarakat desa. Penting untuk diingat bahwa pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan memerlukan kolaborasi antara pemerintah desa dan warga seperti dialog terbuka yang diharapkan dapat menciptakan rasa kepemilikan yang kuat di kalangan masyarakat terhadap proyek tersebut.

Dengan demikian, harapan akan manfaat jangka panjang dari pembangunan infrastruktur ini tidak hanya terbatas pada aspek peningkatan aksesibilitas air, tetapi juga meliputi aspek pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penguatan jaringan sosial yang lebih solid dalam komunitas. Pembangunan embung desa diharapkan dapat menjadi model bagi proyek-proyek infrastruktur lainnya di masa mendatang, yang berfokus pada keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.

Dilanjutkan wawancara dengan Angga jati sebagai kaur perencanaan:

“Terkait pembangunan yang ada di Desa Karangnanas, pemerintah desa merencanakan pada tahun 2024-2025 ada dua pembangunan yaitu embung desa dan membuat lapangan sepak bola. Sebelum berjalannya pembangunan embung ini, kami pemerintah desa melakukan tahapan paling pertama adalah Musrenbangdes dan mengidentifikasi kebutuhan maupun masalah yang dihadapi masyarakat, karena mayoritas di Desa Karangnanas mata pencahariannya petani sehingga kami pemerintah desa mengambil tindakan untuk diutamakan pembangunan infrastruktur embung desa”. (Wawancara 3 Januari 2025)

Hasil wawancara ini secara jelas memberikan gambaran yang mendalam mengenai rencana pembangunan infrastruktur di Desa Karangnanas, yang mencakup dua proyek utama yang direncanakan untuk periode 2024-2025 antara lain adanya pembangunan embung desa dan perbaikan lapangan sepak bola. Pendekatan yang diambil oleh pemerintah desa, yang berawal dari pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes),

mencerminkan komitmen yang kuat terhadap partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Dalam tahap ini, identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat menjadi langkah awal yang sangat penting, memastikan bahwa setiap proyek yang diusulkan tidak hanya selaras dengan aspirasi, tetapi juga dengan realitas sosial-ekonomi yang benar terjadi di alami oleh masyarakat.

Ketergantungan mayoritas penduduk Desa Karangnanas pada sektor pertanian menuntut pemerintah desa untuk memberikan prioritas yang jelas pada pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan produktivitas pertanian, seperti embung desa yang berfungsi sebagai sumber irigasi. Dengan mengutamakan proyek ini, pemerintah desa tidak hanya berusaha memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mengupayakan penciptaan dampak positif yang berkelanjutan terhadap kesejahteraan ekonomi desa secara keseluruhan. Dalam konteks ini, keputusan untuk memfokuskan sumber daya pada pembangunan embung desa menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika lokal serta tantangan yang dihadapi oleh petani, sekaligus mencerminkan pendekatan yang responsif dalam merespons kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Sementara itu, rencana membuat lapangan sepak bola juga menunjukkan perhatian yang signifikan terhadap aspek sosial dan rekreasi, yang merupakan elemen penting dalam memperkuat hubungan sosial di antara warga desa. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di Desa Karangnanas tidak hanya memberikan manfaat kepada masyarakat, tetapi juga

mencakup dimensi sosial yang lebih luas, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan sosial ini menjadi kunci dalam strategi pembangunan yang berkelanjutan, di mana partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek diharapkan dapat mengoptimalkan hasil dan memastikan keberlanjutan dari setiap inisiatif yang diambil.

Lebih lanjut, penting untuk menyadari bahwa keberhasilan dari proyek-proyek ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya. Diharapkan pembangunan infrastruktur ini dapat memberikan dampak jangka panjang yang signifikan, tidak hanya dalam konteks peningkatan produktivitas pertanian, tetapi juga dalam penguatan jaringan sosial, peningkatan kualitas hidup, dan penciptaan lingkungan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Dilanjutkan wawancara dengan Wasun merupakan masyarakat yang berprofesi sebagai buruh:

“Menurut saya sebagai masyarakat, pemerintah desa kurang transparan dalam perencanaan pembangunan, masyarakat kurang dilibatkan termasuk pembangunan embung yang sedang berjalan ini, saya tidak mengetahui adanya pembangunan embung desa tersebut, dan saya mengetahui sendiri ketika proses pembangunan tersebut sudah berjalan, mungkin karena kepala desa digantikan pejabat kecamatan bertugas menjadi PJ kepala desa di Desa Karangnanas”. (Wawancara 12 Januari 2025)

Hasil wawancara ini secara jelas mencerminkan kekhawatiran yang mendalam dari masyarakat mengenai kurangnya transparansi yang ditunjukkan oleh pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan, khususnya terkait dengan proyek pembangunan embung yang saat ini sedang berlangsung.

Ketidakpuasan yang dirasakan warga akibat minimnya keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi yang signifikan antara pemerintah desa dan masyarakat. Masyarakat yang tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai adanya pembangunan embung, yang hanya diketahui setelah proses pembangunan dimulai, mencerminkan kelemahan dalam mekanisme partisipatif yang seharusnya menjadi kekuatan dalam perencanaan pembangunan yang baik terhadap kebutuhan lokal.

Lebih lanjut, yang di mana kepala desa telah digantikan oleh pejabat kecamatan yang berperan sebagai Penjabat (PJ) kepala desa. Pergantian ini berpotensi menyebabkan perubahan dalam komunikasi dan pengambilan keputusan, yang dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat secara signifikan. Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti bahwa transparansi dan partisipasi merupakan dua pilar yang penting dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa adanya keterlibatan aktif dari warga, proyek pembangunan tidak hanya berisiko kehilangan legitimasi, tetapi juga berpotensi mengabaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang sesungguhnya.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki situasi ini, pemerintah desa perlu mengimplementasikan strategi komunikasi yang lebih efektif, yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam setiap fase perencanaan dan pelaksanaan proyek. Pendekatan ini dapat mencakup forum dialog terbuka, penyuluhan, dan konsultasi publik yang dirancang untuk

mengumpulkan masukan dari warga. Dengan cara ini, diharapkan proyek pembangunan, termasuk pembangunan embung desa, dapat berjalan dengan dukungan penuh dari masyarakat, menciptakan rasa memiliki yang kuat, serta memastikan bahwa setiap inisiatif pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan pemerintah desa dapat membangun kembali kepercayaan, memperkuat hubungan dengan masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan dan akuntabel di masa depan.

Kemudian wawancara dengan Sudaryo merupakan masyarakat yang berprofesi sebagai petani:

“Dari dulu pemerintah desa hanya melaksanakan pembangunan perbaikan jalan, setau saya pembangunan jalan di Desa Karangnanas sudah merata dan layak untuk dilewati berbagai alat transportasi. Menurut saya selaku petani, dengan keputusan pemerintah adanya pembangunan di tahun ini yaitu pembangunan embung sangat membantu permasalahan para petani yang dihadapi setiap tahun pada saat musim kemarau sehingga untuk mengatasi kekeringan”.
(Wawancara 14 Januari 2025)

Hasil wawancara ini melihat adanya pandangan positif dari masyarakat, khususnya petani, terhadap inisiatif pembangunan yang diambil oleh pemerintah desa, terutama dalam konteks pembangunan embung yang direncanakan. Meskipun selama ini fokus pemerintah desa cenderung tertuju pada perbaikan infrastruktur jalan, yang telah mencapai tingkat kelayakan untuk dilalui oleh berbagai alat transportasi, kebutuhan akan solusi yang lebih spesifik terhadap tantangan yang dihadapi petani, seperti kekeringan pada musim kemarau. Keputusan untuk melaksanakan pembangunan embung di tahun ini dipandang sebagai langkah strategis yang tidak hanya akan

memberikan manfaat jangka pendek dalam permasalahan kekeringan, tetapi juga berpotensi memperkuat ketahanan pangan dan produktivitas pertanian di Desa Karangnanas secara keseluruhan.

Pembangunan embung diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber irigasi yang sangat penting, menyediakan cadangan air yang diperlukan untuk mendukung aktivitas pertanian, terutama di saat-saat kritis ketika curah hujan tidak mencukupi. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan hasil pertanian, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih maju. Dalam konteks ini, harapan petani agar pemerintah desa terus memperhatikan kebutuhan spesifik mereka menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis kebutuhan dalam perencanaan pembangunan yang lebih luas. Diharapkan, melalui investasi dalam infrastruktur yang tepat, pemerintah desa dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan petani dan masyarakat secara keseluruhan, sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga dalam upaya bersama mencapai ketahanan pangan dan pembangunan yang berkelanjutan.

B. Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Embung Desa

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur embung desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung keberlanjutan ekosistem. Pembangunan embung tidak hanya terletak pada dimensi fisiknya, tetapi juga pada dampak sosial yang dihasilkannya. Proses

pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat memperkuat solidaritas sosial dan menciptakan rasa kepemilikan yang lebih mendalam terhadap infrastruktur yang telah dibangun. Keterlibatan masyarakat dalam proyek ini juga membuka peluang bagi pengembangan keterampilan baru, yang pada akhirnya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal.

Lebih dari itu, embung desa berfungsi sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, menunjukkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan dapat dicapai melalui sinergi dan partisipasi aktif. Dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan dampak, pembangunan embung yang dilakukan dengan perencanaan yang matang dapat menghasilkan manfaat jangka panjang, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan infrastruktur embung desa menjadi langkah strategis yang krusial dalam mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera. Kemudian wawancara dengan Warto sebagai PJ Kepala Desa:

“Memang dalam pelaksanaan pembangunan desa adanya partisipasi masyarakat sangat penting untuk keberhasilan pembangunan tersebut, meskipun masyarakat mempunyai semangat dan antusiasme sangat tinggi terhadap pembangunan yang ada, tetapi dilihat dari kondisi dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengoperasikan alat berat seperti ekskavator, bulldozer, dan alat berat lainnya masih menjadi kendala sehingga hal tersebut pemerintah desa harus mendatangkan tenaga ahli dari luar desa untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan teknis yang dibutuhkan. Mungkin setelah melewati proses awal pembangunan seperti penggalian dan lainnya, kami pemerintah desa akan berusaha untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan tersebut karena mempunyai semangat yang tinggi walaupun hanya bermodal tenaga atau kemampuan fisik”. (Wawancara 8 Januari 2025)

Hasil wawancara ini secara jelas menggarisbawahi signifikansi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sebagai elemen penting yang dapat menentukan keberhasilan proyek-proyek yang direncanakan. Meskipun masyarakat menunjukkan semangat dan antusiasme yang luar biasa terhadap inisiatif pembangunan, realitas di lapangan menciptakan tantangan yang tidak dapat diabaikan, khususnya terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pengoperasian alat berat seperti ekskavator dan bulldozer. Kendala ini menuntut pemerintah desa untuk mendatangkan tenaga ahli dari luar wilayah, guna memastikan bahwa setiap tahap pembangunan dilaksanakan dengan mematuhi standar teknis yang diperlukan.

Keputusan ini mencerminkan dilema yang kompleks, di mana pemerintah desa harus menyeimbangkan antara upaya untuk memaksimalkan potensi lokal dan keharusan untuk memenuhi ekspektasi kualitas yang ditetapkan. Di satu sisi, adanya pemanfaatan tenaga ahli eksternal dapat menjamin bahwa proyek pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, hal ini juga dapat menimbulkan perasaan ketidakberdayaan di kalangan masyarakat lokal yang memiliki semangat tinggi namun terhalang oleh keterbatasan keterampilan teknis.

Oleh karena itu, terdapat harapan bahwa setelah melewati fase awal pembangunan, yang meliputi kegiatan penggalian dan persiapan infrastruktur, pemerintah desa akan berupaya untuk melibatkan masyarakat lebih dalam terkait proses pembangunan selanjutnya. Keterlibatan ini, meskipun mungkin terbatas pada kontribusi berupa tenaga fisik, dapat memberikan dampak yang

signifikan dalam membangun rasa memiliki dan tanggung jawab besar terhadap hasil akhir proyek. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam tahap-tahap berikutnya tidak hanya berpotensi memperkuat ikatan sosial di antara warga desa, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dalam upaya pembangunan.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah desa untuk merumuskan strategi yang lebih baik, yang tidak hanya mengandalkan tenaga ahli dari luar desa tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Dengan cara ini, diharapkan setiap inisiatif pembangunan tidak hanya menjadi hasil dari kontribusi teknis, tetapi juga merupakan hasil dari kerja sama yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat. Dengan besar harapan, pendekatan ini dapat menciptakan dasar yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan, dimana setiap individu merasa bahwa mereka memiliki peran penting dalam mewujudkan visi bersama untuk kemajuan desa.

Kemudian wawancara dengan Parjoko sebagai kaur keuangan:

“Menurut yang saya lihat dari pembangunan sebelumnya, sebenarnya pemerintah desa mampu melaksanakan pembangunan infrastruktur, hanya kami kurangnya dari segi pendanaan yang sudah di khususkan untuk anggaran pembangunan masih belum mencukupi untuk melengkapi fasilitas agar pembangunan berjalan lebih maksimal. Sumber yang digunakan hanya dari Dana Desa, Bankeu dan tidak bekerja sama dari pihak ketiga ataupun dari luar Pemerintahan Desa Karangnanas”. (Wawancara 3 Januari 2025)

Hasil wawancara ini secara mendalam menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, meskipun terdapat kapasitas yang cukup untuk melaksanakan

inisiatif tersebut. Meskipun pemerintah desa menunjukkan potensi dalam mengelola dan menjalankan proyek-proyek infrastruktur, salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan pendanaan, yang berfungsi sebagai faktor krusial yang menghambat optimalisasi hasil pembangunan. Sumber pendanaan yang saat ini tersedia, yang meliputi Dana Desa dan Bantuan Keuangan (Bankeu), tampaknya belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan fasilitas yang diperlukan, sehingga proyek pembangunan tidak dapat berjalan dengan efisien dan maksimal.

Lebih lanjut, penting untuk dicatat bahwa ketergantungan yang tinggi pada sumber pendanaan internal, tanpa adanya kerja sama dengan pihak ketiga atau dukungan dari luar Pemerintahan Desa Karangnanas, menciptakan keterbatasan signifikan dalam kualitas pembangunan yang dapat dicapai. Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan yang lebih strategis dan inovatif untuk menjalin kemitraan dengan sektor swasta, lembaga non-pemerintah, atau organisasi internasional yang dapat memberikan dukungan finansial dan teknis yang dibutuhkan. Melalui sinergi tersebut, pengembangan infrastruktur yang lebih optimal dan berkelanjutan tidak hanya akan meningkatkan kapasitas pelayanan publik, tetapi juga berkontribusi pada penguatan ekonomi dan sosial desa secara keseluruhan.

Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala pendanaan ini, pemerintah desa perlu mengembangkan strategi yang lebih matang dalam perencanaan serta pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Ini mencakup eksplorasi yang lebih mendalam terhadap berbagai sumber dana alternatif. Hanya dengan

pendekatan kolaboratif, diharapkan pembangunan infrastruktur dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Desa Karangnanas, serta menciptakan pondasi yang kokoh untuk pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan.

Dilanjutkan wawancara dengan Sutarno sebagai kasi kesejahteraan:

“Jelas partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur embung ini sangatlah penting. Dalam pembangunan ini, kami menghadapi tantangan seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia seperti masyarakat kurang paham dalam menggunakan alat berat, hal ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan masih dibatasi”. (Wawancara 3 Januari 2025)

Hasil wawancara ini membahas terkait urgensi partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur embung sebagai elemen terpenting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan proyek tersebut. Meskipun terdapat kesadaran akan pentingnya keterlibatan masyarakat, tantangan yang dihadapi, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia, menjadi penghalang signifikan dalam proses partisipatif ini. Ketidapahaman masyarakat dalam penggunaan alat berat menciptakan situasi dimana keterlibatan mereka dalam pembangunan masih terbatas, sehingga mengurangi potensi kontribusi yang dapat diberikan oleh komunitas lokal.

Kondisi ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk mengembangkan kapasitas SDM di tingkat desa, agar masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dan berdaya. Tanpa adanya pelatihan dan peningkatan keterampilan yang memadai, partisipasi masyarakat dalam proyek pembangunan embung cenderung akan tetap bersifat terbatas dan tidak maksimal. Hal ini dapat

berdampak negatif pada hasil akhir proyek, yang seharusnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi pemerintah desa untuk merancang dan melaksanakan program pelatihan yang komprehensif, yang tidak hanya akan memberdayakan masyarakat dengan keterampilan teknis, tetapi juga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan. Dengan demikian, diharapkan pembangunan embung dapat menjadi simbol kolaborasi yang sukses antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus mengarah pada peningkatan kesejahteraan dan ketahanan sosial di desa.

Kemudian wawancara dengan Angga jati sebagai kaur perencanaan:

“Dari yang saya lihat sebagai bagian dari pemerintah desa, memang partisipasi masyarakat masih sangat kurang karena rata-rata keahlian masyarakat seperti kuli bangunan, buruh tani dan bidang tersebut cukup bermodal tekat dan tenaga yang kuat, beda dengan yang kami butuhkan dalam pembangunan saat ini khususnya dalam pembangunan embung desa yang memerlukan tidak hanya sebatas tekat dan tenaga saja namun kami memerlukan tenaga kerja yang mampu mengoperasikan alat-alat berat. Sehingga kami merencanakan akan adanya program pelatihan ketrampilan teknis untuk masyarakat agar dapat berperan lebih aktif dalam proyek pembangunan yang akan datang”. (Wawancara 3 Januari 2025)

Hasil wawancara ini secara jelas mengungkapkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, khususnya dalam proyek pembangunan embung. Meskipun terdapat keinginan dan tekad yang kuat di kalangan masyarakat untuk terlibat, kenyataannya menunjukkan bahwa keahlian yang dimiliki oleh sebagian besar warga, seperti kuli bangunan masih terbatas pada kemampuan fisik dan keahlian. Hal ini menjadi kendala

signifikan, mengingat proyek pembangunan embung memerlukan kompetensi teknis yang lebih berpengalaman, termasuk kemampuan untuk mengoperasikan alat berat yang tidak dapat dilaksanakan hanya dengan modal semangat semata.

Pernyataan ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk mengembangkan kapasitas teknis masyarakat agar dapat memenuhi tuntutan proyek pembangunan yang semakin rumit. Dalam konteks ini, pemerintah desa menyadari bahwa untuk menciptakan lingkungan yang lebih partisipatif dan inklusif, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih jelas. Oleh karena itu, perencanaan untuk melaksanakan program pelatihan keterampilan teknis menjadi suatu langkah yang sangat tepat dan relevan. Program ini tidak hanya akan membekali masyarakat dengan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi lebih aktif dalam proyek-proyek pembangunan yang akan datang, tetapi juga dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab sangat tinggi terhadap hasil pembangunan.

Dengan harapan kedepannya, pelatihan ini berpotensi tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan operasional masyarakat, tetapi juga untuk membangun kepercayaan diri dan memberdayakan mereka dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Melalui penguatan kapasitas SDM yang berbasis pada kebutuhan lokal, diharapkan masyarakat dapat berperan lebih signifikan dalam setiap tahapan pembangunan, menjadikan proyek-proyek tersebut sebagai hasil kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Dalam jangka panjang, upaya ini dapat berkontribusi pada

pengembangan komunitas yang lebih berdaya dan mandiri, serta menciptakan fondasi yang kuat bagi pembangunan yang berkelanjutan di desa.

Kemudian wawancara dengan Pujiono sebagai Ketua BPD:

“Pemerintah desa sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pembangunan ini, meskipun dalam proses pembangunan menghadapi beberapa tantangan seperti kurang melibatkan masyarakat dan pendanaan. Keterbatasan SDM seperti kurangnya ketrampilan dalam mengoperasikan alat berat menjadi kendala, kami menyadari pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah desa telah berusaha mengajukan permohonan untuk pelatihan ketrampilan kepada dinas terkait. Kami berharap bisa mengadakan pelatihan bagi warga agar mereka bisa mengoperasikan alat berat dan berpartisipasi dalam pembangunan. Dan saya juga berharap pemerintah desa lebih transparan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, penting untuk membangun kerja sama dengan pihak ketiga seperti pihak swasta atau lembaga lainnya, sehingga kita dapat menciptakan pembangunan yang lebih berkualitas”. (Wawancara 5 Januari 2025)

Hasil wawancara ini secara mendalam mencerminkan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan, meskipun mereka dihadapkan pada serangkaian tantangan yang signifikan, seperti kurangnya keterlibatan masyarakat dan kendala pendanaan yang menghambat kemajuan. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam hal keterampilan mengoperasikan alat berat, merupakan salah satu hambatan utama yang menghalangi kelancaran proses pembangunan. Menyadari esensi dari peningkatan kapasitas masyarakat sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah desa telah mengambil langkah proaktif dengan mengajukan permohonan kepada dinas terkait untuk mengadakan pelatihan keterampilan. Tindakan ini mencerminkan komitmen yang kuat untuk memberdayakan warga desa, sekaligus mewujudkan harapan agar masyarakat

dapat mengoperasikan alat berat dan berpartisipasi secara aktif dalam setiap aspek proyek pembangunan.

Lebih lanjut, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yang merupakan hal penting dalam membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat. Transparansi bukan hanya akan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya, tetapi juga akan mendorong partisipasi aktif masyarakat, yang pada gilirannya dapat memperkuat legitimasi dan keberlanjutan proyek yang dilaksanakan. Dalam konteks ini, pentingnya membangun kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk sektor swasta dan lembaga non-pemerintah, menjadi strategi yang sangat relevan untuk menciptakan pembangunan yang lebih berkualitas. Kolaborasi semacam ini tidak hanya berpotensi menyediakan sumber daya tambahan, tetapi juga menghadirkan keahlian dan inovasi yang dapat signifikan meningkatkan efektivitas proyek yang dijalankan.

Dengan mengintegrasikan seperti pelatihan keterampilan, transparansi, dan kerja sama strategis dengan pihak ketiga, diharapkan pemerintah desa dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing. Upaya ini tidak hanya akan memperkuat kapasitas masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur yang dibangun, serta menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat Desa Karangnanas. Dalam jangka panjang, pendekatan ini diharapkan dapat membentuk fondasi yang kokoh untuk

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan sosial, sehingga masyarakat dapat meraih manfaat yang lebih besar dari setiap inisiatif pembangunan yang dilaksanakan.

Dilanjutkan wawancara dengan Wasun sebagai masyarakat yang berprofesi sebagai buruh:

“Saya dan warga lainnya pernah minta kepada pemerintah desa untuk dilibatkan berpartisipasi dalam pembangunan tersebut, mungkin tenaga masyarakat lokal belum terlalu di butuhkan karena masih awal pembangunan. Tetapi di setiap adanya pembangunan contohnya perbaikan jalan, masyarakat belum pernah di libatkan kedalam pembangunan tersebut, masyarakat sering dapat perintah dari pemerintah desa hanya sebatas kerja bakti gotong-royong lingkungan untuk kebersihan. Padahal pekerja buruh di Desa Karangnanas lumayan cukup banyak, dan besar harapan kami sebagai buruh harian lepas dilibatkan dalam pembangunan apapun yang dilakukan oleh pemerintah desa karena sangat bermanfaat juga bagi kami dan secara tidak langsung adanya perputaran ekonomi bagi masyarakat Desa Karangnanas”. (Wawancara 12 Januari 2025)

Hasil wawancara ini dengan tegas menyoroti ketidakpuasan masyarakat terhadap minimnya partisipasi dalam proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, meskipun telah ada permohonan untuk dilibatkan secara aktif. Masyarakat yang telah menunjukkan keinginan untuk berkontribusi, merasa bahwa keterlibatan mereka dalam pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, masih sangat terbatas. Hal ini menciptakan kesan bahwa meskipun keterbatasan potensi sumber daya manusia di Desa Karangnanas, pemerintah desa belum sepenuhnya memanfaatkan keahlian dan tenaga kerja lokal yang ada.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai pendekatan partisipatif yang digunakan dalam proses pembangunan. Masyarakat

cenderung hanya diberi tugas untuk kegiatan gotong-royong yang bersifat terbatas seperti kebersihan lingkungan, tanpa adanya kesempatan untuk terlibat dalam proyek yang lebih resmi dari pemerintah desa. Di sisi lain, harapan masyarakat, terutama para buruh harian lepas, untuk dilibatkan dalam setiap aspek pembangunan mencerminkan kebutuhan akan perputaran ekonomi yang lebih dinamis di tingkat lokal. Partisipasi dalam proyek-proyek pembangunan tidak hanya akan memberikan manfaat langsung dari segi pendapatan bagi mereka, tetapi juga dapat memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan.

Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak bagi pemerintah desa untuk merumuskan strategi yang lebih matang, tidak hanya mengakui tetapi juga memberdayakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan masyarakat yang lebih signifikan dalam proyek pembangunan dapat menciptakan dampak positif yang lebih luas, tidak hanya dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga dalam menciptakan rasa komunitas yang solid dalam bidang ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat, pemerintah desa dapat menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih berkelanjutan dan bermanfaat terhadap kebutuhan lokal, yang dimana dapat memperkuat kondisi sosial dan ekonomi Desa Karangnanas.

Kemudian wawancara dengan Sudaryo merupakan masyarakat yang berprofesi sebagai petani

“Ketika dibilang pembangunan embung desa ini apakah sudah sesuai sesuai untuk menghadapi permasalahan yang ada, menurut kami

sebagai petani dengan adanya pembangunan embung desa ini pasti sangat berpengaruh terhadap efektifnya dalam sektor pertanian akan lebih baik, pembangunan embung desa di prioritaskan oleh pemerintah desa mungkin karena mayoritas masyarakat di desa karangnanas mata pencahariannya menjadi petani, sehingga dengan adanya pembangunan tersebut akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Tetapi seperti apa yang saya lihat ketika berkunjung ke sawah, dalam proses pembangunan embung desa ini kayanya belum ada keterlibatan warga asli Desa Karangnanas”. (Wawancara 14 Januari 2025)

Hasil wawancara ini secara mendalam menjelaskan perspektif masyarakat yang berprofesi sebagai petani mengenai relevansi dan efektivitas pembangunan embung desa dalam konteks pemecahan masalah yang dihadapi oleh sektor pertanian di Desa Karangnanas. Masyarakat meyakini bahwa keberadaan embung akan memainkan peran krusial dalam meningkatkan efektivitas irigasi, yang diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani lokal. Pembangunan embung yang diprioritaskan oleh pemerintah desa tampaknya sangat strategis, mengingat mayoritas penduduk desa bergantung pada pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama, sehingga pembangunan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat khususnya petani.

Namun, di balik optimisme tersebut, muncul keprihatinan yang mendalam terkait dengan minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan embung. Pengamatan masyarakat menunjukkan bahwa selama pelaksanaan proyek, partisipasi warga asli Desa Karangnanas masih jauh dari harapan, meskipun proyek ini dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada mereka. Kurangnya partisipasi aktif ini menciptakan

kesenjangan yang signifikan antara perencanaan dan realisasi, di mana suara, keahlian, dan kontribusi masyarakat lokal tidak terakomodasi dengan semestinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai keberlanjutan dan relevansi proyek, serta potensi dampak negatif terhadap rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan, pemerintah desa perlu merumuskan pendekatan yang lebih partisipatif, yang tidak sekadar melibatkan masyarakat dalam fase akhir, tetapi juga mengintegrasikan mereka dalam setiap tahap proses pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, tidak hanya akan meningkatkan efektivitas proyek dan memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan kebutuhan lokal, tetapi juga dapat memperkuat ikatan sosial dan membangun kepercayaan yang lebih erat antara pemerintah dan warga. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat berfungsi sebagai pendorong untuk menciptakan sinergi yang harmonis dalam pembangunan desa.

Dalam jangka panjang, pendekatan semacam ini diharapkan dapat menciptakan komunitas yang mampu beradaptasi, di mana setiap individu merasa memiliki peran penting dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi desa mereka. Dengan demikian, pembangunan embung tidak hanya akan menjadi infrastruktur fisik, tetapi juga simbol kolaborasi yang sukses antara pemerintah dan masyarakat, yang secara tidak langsung dapat mengarah pada pengembangan sosial dan ekonomi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan di Desa Karangnanas.

C. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Embung Desa

Pengawasan terhadap pembangunan embung desa juga salah satu tahap untuk memastikan kesuksesan dan keberlanjutan proyek tersebut. Pengawasan berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Dengan adanya pengawasan yang ketat, potensi korupsi atau penyalahgunaan dana publik dapat diminimalisir, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat penuh dari proyek yang dilaksanakan. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga yang terlibat dalam pembangunan.

Dalam konteks partisipasi masyarakat, pengawasan yang melibatkan warga desa dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap proyek. Ketika masyarakat berperan dalam proses pengawasan, mereka merasa lebih bertanggung jawab dan peduli terhadap keberlangsungan embung yang dibangun, sehingga mendorong upaya mereka untuk menjaga dan merawat infrastruktur tersebut. Secara keseluruhan, pengawasan pembangunan embung desa tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa proyek berjalan dengan baik, transparan, dan berkelanjutan.

Kemudian wawancara dengan Warito selaku PJ Kepala Desa:

“Secara keseluruhan, pengawasan yang kami lakukan dari awal perencanaan sampai dengan pelaksanaan saat ini cukup efektif,

tetapi kurangnya pengawasan oleh masyarakat terhadap pembangunan ini karena masyarakat belum terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur embung desa”. (Wawancara 8 Januari 2025)

Hasil wawancara tersebut melihat dinamika kompleks yang berkaitan dengan pengawasan pembangunan infrastruktur embung desa. Meskipun pengawasan yang dilakukan oleh pihak desa dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan menunjukkan tingkat efektivitas yang relatif memadai, terdapat kekurangan dalam hal keterlibatan masyarakat yang berdampak pada pengawasan proyek.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ini mengindikasikan kurangnya Sumber Daya Manusia terkait pembangunan tersebut. Masyarakat yang tidak terlibat cenderung tidak memiliki rasa kepemilikan terhadap infrastruktur yang dibangun, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan pengawasan yang konstruktif. Hal ini dapat mengakibatkan potensi masalah dalam pemeliharaan dan keberlanjutan infrastruktur di masa mendatang, karena masyarakat mungkin tidak merasa bertanggung jawab terhadap proyek yang tidak mereka anggap sebagai bagian dari diri mereka.

Lebih jauh, situasi ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih matang untuk meningkatkan kualitas SDM dan partisipasi masyarakat. Upaya untuk melibatkan tokoh masyarakat dan melaksanakan sosialisasi yang lebih mendalam dapat menjadi langkah krusial dalam mengatasi kurangnya pengawasan oleh masyarakat. Dengan demikian, peningkatan partisipasi masyarakat tidak hanya akan memperkuat pengawasan, tetapi

juga membangun rasa kepemilikan yang lebih kokoh terhadap proyek infrastruktur, mendukung keberlanjutan dan efektivitasnya dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, analisis ini menyoroti pentingnya sinergi antara pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat sebagai elemen kunci dalam memastikan keberhasilan pembangunan infrastruktur embung desa.

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan Sutarno selaku Kasi

Kesejahteraan:

“Bagian dari pemerintah desa Karangnanas, saya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan ini sesuai dengan rencana awal yang sudah di musyawarahkan oleh pemerintah desa dan secara berkala untuk mengevaluasi kemajuan proses pembangunan untuk mengetahui kualitas pembangunan yang sedang berjalan ini”. (Wawancara 3 Januari 2025)

Pernyataan tersebut menjelaskan tanggung jawab strategis yang dipegang oleh pemerintah desa Karangnanas dalam konteks pengawasan pembangunan infrastruktur. Tugas ini tidak hanya meliputi pemantauan kesesuaian proyek dengan rencana awal yang telah disepakati melalui musyawarah, tetapi juga mencakup evaluasi berkala mengenai kemajuan proses pembangunan.

Evaluasi yang dilakukan secara berkala bertujuan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini, sehingga langkah-langkah yang diperlukan dapat diambil untuk memastikan bahwa kualitas pembangunan tetap terjaga. Proses ini mencerminkan pentingnya

akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek, di mana setiap tahap pembangunan dievaluasi untuk memastikan bahwa hasil akhir memenuhi standar yang diharapkan.

Secara keseluruhan, tanggung jawab ini menekankan pentingnya kolaborasi keseluruhan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini tidak hanya berkontribusi pada keberhasilan fisik proyek, tetapi juga pada peningkatan rasa memiliki dan partisipasi masyarakat, yang merupakan faktor penting dalam keberlanjutan dan efektivitas infrastruktur yang dibangun.

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan Wasun selaku masyarakat berprofesi buruh:

“Saat ini sepertinya masyarakat belum mempunyai hak terkait pengawasan pembangunan, karena belum ada partisipasi secara langsung terkait pelaksanaan pembangunan embung desa ini, tapi kami sebagai masyarakat juga berharap adanya pembangunan ini berdampak baik terhadap kesejahteraan masyarakat.” (12 Januari 2025)

Pernyataan tersebut mendeskripsikan kondisi yang menunjukkan adanya kekurangan dalam aspek partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pembangunan infrastruktur, khususnya embung desa. Ketidakadaan partisipasi langsung ini mengindikasikan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menyadari hak-hak mereka dalam proses pengawasan, yang seharusnya menjadi bagian integral dari pelaksanaan proyek pembangunan.

Situasi ini mencerminkan celah dalam mekanisme komunikasi antara pemerintah desa dan warga, yang dapat menghambat pembentukan

rasa kepemilikan terhadap proyek tersebut. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan itu sendiri, karena warga yang tidak berpartisipasi cenderung tidak memiliki suara dalam menentukan arah dan kualitas pembangunan yang dilaksanakan.

Namun, harapan masyarakat adanya dampak positif dari pembangunan embung ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun partisipasi mereka saat ini masih terbatas, terdapat keinginan untuk terlibat dalam proses yang dapat membawa perubahan signifikan bagi kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, penting untuk menciptakan ruang dialog yang lebih inklusif, di mana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait proyek pembangunan. Dengan mengedepankan partisipasi masyarakat, tidak hanya hak-hak mereka sebagai warga yang diakui, tetapi juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

D. Peran Pemerintah Desa Dalam Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Embung Desa

Evaluasi dalam konteks pembangunan infrastruktur embung desa memegang peranan yang sangat krusial untuk menjamin keberhasilan dan efektivitas proyek tersebut. Proses evaluasi ini memungkinkan penilaian kinerja proyek secara keseluruhan, sehingga pihak-pihak terkait dapat mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, serta mengevaluasi apakah proyek tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat. Selain itu, evaluasi berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi masalah atau hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat diimplementasikan secara tepat waktu.

Evaluasi penting untuk menilai dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan embung, memastikan bahwa proyek tidak hanya memenuhi kebutuhan air, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem lokal serta kesejahteraan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi, rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap proyek dapat ditingkatkan, serta memberikan masukan yang berharga dari perspektif pengguna akhir. Secara keseluruhan, evaluasi dalam pembangunan infrastruktur embung desa bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa proyek tersebut berjalan dengan baik, memberikan manfaat yang maksimal, serta berkontribusi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Kemudian wawancara dengan Warto selaku PJ Kepala Desa:

“Terkait evaluasi, kami pemerintah desa melakukan evaluasi secara berkala terkait proses pembangunan yang sedang berjalan saat ini, kami melakukan evaluasi dua minggu sekali dengan membahas perkembangan pembangunan dan kendala yang dihadapi saat berjalannya pembangunan ini, sekaligus berdiskusi bagaimana untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada.” (Wawancara 8 Januari 2025)

Pernyataan tersebut mendeskripsikan dedikasi pemerintah desa dalam melaksanakan evaluasi yang sistematis dan berkala terhadap proses pembangunan yang tengah berlangsung. Dengan frekuensi evaluasi yang dijadwalkan setiap dua minggu, pemerintah desa menunjukkan keseriusan dalam memantau kemajuan proyek serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaannya. Proses evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai forum diskusi konstruktif, di mana beragam pihak berpartisipasi dalam menganalisis permasalahan yang ada serta merumuskan solusi yang efektif.

Pendekatan ini menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan pelaksana proyek, evaluasi berkala ini menciptakan ruang dialog yang inklusif dan partisipatif. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta kekhawatiran mereka, sehingga pemerintah desa dapat lebih responsif terhadap kebutuhan yang nyata di lapangan.

Evaluasi yang dilakukan secara rutin ini berpotensi untuk meningkatkan efektivitas pembangunan. Dengan adanya analisis mendalam

mengenai kemajuan dan hambatan, pemerintah desa dapat mengambil langkah-langkah korektif yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap fase pembangunan berjalan sesuai rencana. Selain itu, diskusi mengenai solusi atas berbagai permasalahan yang muncul akan mendorong kolaborasi antar pihak, memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap proyek tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, proses evaluasi ini mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, di mana partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas menjadi landasan utama. Dengan demikian, evaluasi berkala ini tidak hanya berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan proyek, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pembangunan yang berkelanjutan, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui proses ini, diharapkan pembangunan yang dilakukan dapat memenuhi harapan masyarakat dan menjadi solusi nyata bagi tantangan yang dihadapi.

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan Angga Jati selaku kaur perencanaan:

“Saya sebagai pemerintah desa juga mempunyai tugas merencanakan dan mengawasi seluruh proses pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Karangnanas, kami saat ini baru mencapai proses penggalan embung dan sudah mencapai sekitar 50% kemajuan pembangunan yang sedang berjalan ini, saya juga bertanggung jawab untuk memastikan semua tahapan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan.” (Wawancara 3 Januari 2025)

Pernyataan tersebut menjelaskan tanggung jawab yang sangat signifikan yang dipegang oleh pemerintah desa dalam konteks perencanaan

dan pengawasan pembangunan infrastruktur di Desa Karangnanas. Dengan jelas, kaur perencanaan tersebut menekankan perannya sebagai pengelola proses pembangunan, yang mencakup tidak hanya aspek teknis, tetapi juga dimensi manajerial yang sangat penting. Penggalan embung yang telah mencapai 50% menunjukkan kemajuan yang cukup baik, meskipun masih berada dalam tahap awal pelaksanaan, yang menandakan adanya potensi untuk percepatan serta optimalisasi dalam tahap-tahap berikutnya.

Pengawasan yang ketat terhadap setiap tahapan pembangunan mencerminkan komitmen mendalam untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan kesadaran tinggi akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan proyek, di mana setiap langkah harus terukur, terencana, dan dievaluasi secara berkala. Selain itu, pernyataan ini menyoroti dinamika kompleks antara perencanaan dan realitas di lapangan, di mana berbagai tantangan dapat muncul dan memerlukan penyesuaian strategi yang adaptif dan responsif.

Pernyataan ini juga mencerminkan pemahaman mendalam mengenai pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam keberhasilan proyek. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, pemerintah desa dapat mendorong partisipasi aktif yang, pada gilirannya, akan memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif terhadap hasil pembangunan.

Memperlihatkan upaya proaktif pemerintah desa dalam menciptakan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan fokus pada pencapaian target dan pengelolaan yang baik, diharapkan pembangunan embung ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi keberlangsungan sumber daya air, meningkatkan ketahanan pangan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Karangnanas.

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan Sutarno selaku Kasi Kesejahteraan:

“Evaluasi ini guna untuk melihat sejauh mana proses pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan dan kami berusaha semaksimal mungkin pembangunan ini berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat, walaupun dalam partisipasi masyarakat desa Karangnanas masih sangat terbatas”. (Wawancara 3 Januari 2025)

Pernyataan dari Sutarno selaku Kasi Kesejahteraan menjelaskan terkait inti dari evaluasi sebagai salah satu hal penting dalam menilai kemajuan dan efektivitas proses pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung. Dengan tegas, individu tersebut menekankan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana dampak pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat, dengan harapan bahwa hasil yang dicapai akan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan warga.

Namun, adanya tantangan yang harus dihadapi yaitu terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Keterbatasan tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara rencana yang diusung dan realitas di lapangan, di mana partisipasi aktif masyarakat sangat penting

untuk memastikan keberhasilan proyek. Partisipasi yang minim dapat menyebabkan kurangnya dukungan sosial dan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya inisiatif pembangunan tersebut, sehingga potensi manfaatnya tidak dapat dimaksimalkan.

Upaya untuk memaksimalkan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat menuntut adanya strategi yang lebih inklusif dan partisipatif. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap proyek yang dilaksanakan. Dengan melibatkan masyarakat secara lebih aktif, pemerintah desa dapat mendorong kolaborasi dalam penyelesaian masalah, serta mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan lebih tepat.

Selain itu, pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat juga tidak dapat diabaikan. Penyampaian informasi yang jelas dan transparan mengenai tujuan, manfaat, dan proses pembangunan akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini dapat dilakukan melalui forum-forum diskusi, sosialisasi, atau kegiatan komunitas yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Ini mencerminkan upaya pemerintah desa untuk melaksanakan evaluasi yang berorientasi pada hasil, sambil menyadari pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, perlu diambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Pengembangan kapasitas

masyarakat, melalui pelatihan dan pendidikan mengenai pentingnya infrastruktur dan pengelolaannya, juga menjadi langkah yang penting.

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan Pujiono selaku Ketua BPD:

“Selama proses pembangunan berjalan, sampai saat ini BPD belum di undang untuk mengikuti evaluasi, tapi seharusnya evaluasi ini harus diikuti oleh seluruh pemerintah desa, BPD, dan masyarakat agar terdapat ketransparansian proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa”. (Wawancara 5 Januari 2025)

Pernyataan tersebut menggambarkan ketidakpuasan yang mendalam terkait dengan rendahnya tingkat keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses evaluasi pembangunan yang sedang berlangsung. Dengan tegas, hal ini menekankan pentingnya partisipasi menyeluruh dari semua elemen pemerintahan desa, termasuk BPD, dalam evaluasi untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek. Keterlibatan BPD bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan komponen esensial yang dapat memperkuat legitimasi serta kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan.

Minimnya undangan kepada BPD untuk berpartisipasi dalam evaluasi mencerminkan adanya kesenjangan komunikasi yang signifikan antara pemerintah desa dan lembaga representatif masyarakat. Keterlibatan BPD dalam proses evaluasi tidak hanya memberikan perspektif yang beragam, tetapi juga membantu memastikan bahwa suara dan aspirasi masyarakat yang lebih luas terwakili. Tanpa partisipasi aktif dari BPD,

risiko munculnya evaluasi yang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan menjadi lebih besar, yang pada gilirannya dapat mengurangi efektivitas dan relevansi hasil evaluasi itu sendiri.

Pernyataan ini juga menjelaskan terkait kesadaran akan pentingnya transparansi dalam proses pembangunan. Proses yang transparan tidak hanya menguntungkan pemerintah desa, tetapi juga membangun kepercayaan di kalangan masyarakat. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, diharapkan terdapat saluran komunikasi yang lebih terbuka. Ketidaktransparansian dalam proses dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengganggu keberlangsungan proyek dan menurunkan dukungan terhadap pemerintah desa.

Aspek lain yang perlu dicermati adalah pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa dan BPD dalam merumuskan kebijakan serta strategi pembangunan. Dengan sinergi yang baik, BPD dapat memberikan masukan yang berharga berdasarkan pengalaman dan pengetahuan lokal, sehingga proyek yang dijalankan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan BPD dalam evaluasi juga memungkinkan mereka untuk lebih memahami tantangan yang dihadapi dalam implementasi proyek, sehingga dapat memberikan dukungan yang lebih efektif.

Secara keseluruhan, pernyataan ini menegaskan bahwa evaluasi pembangunan seharusnya menjadi proses yang inklusif dan partisipatif. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat

bagi masyarakat, langkah-langkah strategis perlu diambil untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat. Keterlibatan BPD dan masyarakat dalam evaluasi tidak hanya akan meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap hasil pembangunan. Dengan demikian, hasil evaluasi yang diperoleh dapat lebih valid dan bermanfaat, memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif dalam setiap tahap pembangunan.

Dilanjutkan wawancara dengan Wasun selaku masyarakat yang berprovesi menjadi buruh:

“Kalo dari saya pribadi, dari awal perencanaan sampai proses pembangunan saat ini bahkan sampai evaluasi belum merasa dilibatkan, cuma bisa berharap saja semoga pembangunan infrastruktur ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Desa Karangnanas.” (Wawancara 12 Januari 2025)

Pernyataan dari Wasun selaku masyarakat yang berprovesi menjadi buruh ini menjelaskan ketidakpuasan yang mendalam dari seorang warga masyarakat, khususnya buruh, terkait dengan kurangnya keterlibatan mereka dalam semua tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi pembangunan infrastruktur di Desa Karangnanas. Dengan jelas, hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat adalah pihak yang paling merasakan dampak dari proyek tersebut, mereka merasa diabaikan dan tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif.

Minimnya partisipasi masyarakat dalam proses ini mencerminkan adanya kesenjangan komunikasi yang signifikan antara pemerintah desa dan warga. Ini menunjukkan bahwa pemerintah desa mungkin belum

sepenuhnya memahami pentingnya melibatkan masyarakat dalam setiap langkah pembangunan, yang bisa mengakibatkan hilangnya legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat terhadap proyek yang dilaksanakan.

Pernyataan ini juga menunjukkan adanya harapan. Harapan bahwa pembangunan infrastruktur dapat berjalan lancar dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat mencerminkan keinginan kuat untuk melihat perubahan positif. Namun, harapan ini juga mencerminkan ketidakpastian, di mana masyarakat merasa terpaksa mengandalkan hasil akhir tanpa bisa mempengaruhi proses yang berlangsung, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan karena mereka tidak memiliki saluran untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Secara keseluruhan, pernyataan ini menekankan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam pembangunan. Untuk mencapai hasil yang optimal dengan melibatkan masyarakat, termasuk buruh, dalam perencanaan dan evaluasi, diharapkan akuntabilitas meningkat dan rasa kepemilikan terhadap proyek dapat tumbuh, sehingga hasil pembangunan lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, Pemerintah Desa Karangnanas berperan aktif dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur embung melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Perencanaan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, pemerintah desa melihat dari skala prioritas, terutama terkait ketersediaan air yang dimana mayoritas mata pencaharian masyarakat di Desa Karangnanas yaitu berprofesi dalam bidang pertanian.
2. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur embung di Desa Karangnanas, dilakukan secara terstruktur yang melibatkan perangkat desa dan dibantu oleh BPD. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan masih terkendala karena kurangnya sumber daya manusia seperti kurang bisa mengoperasikan alat berat. Hal tersebut menyebabkan pemerintah desa masih menggunakan tenaga kerja dari luar desa.
3. Dalam pengawasan pembangunan infrastruktur embung desa, menunjukkan bahwa pengawasan oleh pemerintah desa yang efektif. Meskipun pemerintah desa melakukan pengawasan yang memadai, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses ini sehingga mengurangi rasa tanggung jawab terhadap infrastruktur yang sedang dibangun. Kurangnya transparansi dan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

4. Evaluasi Pembangunan embung desa dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan pembangunan, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan solusi dari permasalahan yang ada, namun kurangnya keterlibatan BPD dan masyarakat dalam proses evaluasi menciptakan kesenjangan komunikasi dan mengurangi rasa kepemilikan terhadap proyek.

B. Saran

1. Pemerintah desa sebaiknya merancang dan melaksanakan mekanisme yang lebih efisien untuk mengikutsertakan masyarakat dalam setiap proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Forum dialog terbuka, musyawarah desa, dan penyuluhan dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan masukan dari warga, sehingga proyek yang dijalankan benar-benar mencerminkan kebutuhan dari aspirasi masyarakat.
2. Mengingat kurangnya ketrampilan dalam pengoperasian alat berat, disarankan agar pemerintah desa mengembangkan program pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Inisiatif ini tidak hanya akan meningkatkan kapasitas teknis warga, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab mereka terhadap proyek pembangunan.
3. Sangat penting bagi pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan proyek-proyek pembangunan. Informasi yang jelas mengenai penggunaan dana dan kemajuan proyek harus disampaikan kepada masyarakat secara berkala, guna membangun kepercayaan dan akuntabilitas.
4. Dalam evaluasi pemerintah desa sebaiknya melibatkan masyarakat secara aktif untuk memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap proyek pembangunan yang sedang berlangsung serta menyediakan saluran komunikasi yang jelas antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga proyek tersebut dapat beroperasi secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, B., Kesaulija, H., Hidayat, G., Alua, I., Sawaki, M., Rumbewas, L., ... & Rumi, B. (2019). Sistem-Sistem Pertanian dalam Perspektif Ekosistem.
- Adisetya, A. (2020). *PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus pada BUMDes Cahaya Bumi Perkasa Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)* (Doctoral dissertation, Iain Purwokerto).
- Afriliawati, A. (2023). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA NEGERI BATIN KECAMATAN UMPU SEMENGUK KABUPATEN WAY KANAN* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Agustin, M. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan). *Publika*, 4(1).
- Akib, K., & Tepare, O. A. (2020). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa malitu kecamatan poso pesisir selatan kabupaten poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 8(1), 29-32.
- Al Faraby, M. Z. (2023). Dampak Kebijakan Pemerintah dalam Keberlanjutan PLTU Batang Terhadap Visi Indonesia 2024 Terkait Pengelolaan Lingkungan: Array. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 59-76.
- Al Mighwar, M. (2023). *Desa Mekarsari-Bandung: Bangkong Reang warisan budaya dan identitas yang hampir terlupakan* (Doctoral dissertation, DPMD Provinsi Jawa Barat).
- AMELIANA, A. (2024). *KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DESA PINANG SEBATANG BARAT DAN PERUSAHAAN SWASTA (PT. ARARA ABADI) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Amraeni, Y., & Nirwan, M. (2021). *Sosial Budaya Kesehatan Dan Lingkungan Masyarakat Pesisir Dan Tambang*. Penerbit NEM.
- Andini, N. (2013). Pengorganisasian komunitas dalam pengembangan agrowisata di desa wisata studi kasus: desa wisata Kembangarum, Kabupaten Sleman. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 24(3), 173-188.
- Andre, P. K. (2023). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (Studi Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Anisa, B. M. N., Noor, I., & Nugroho, G. W. (2024). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Jampangkulon. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3), 1665-1687.
- Ardiansyah, N., Adilansyah, A., Hendra, H., Junaidin, J., & Rizkiani, F. R. F. (2024). Tahapan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(6), 803-810.

- Arofah, Z., & Puspaningtyas, A. (2023). Optimalisasi Pelayanan Mitigasi Bencana Banjir di Karangbinangun Lamongan Agar Masyarakat Peduli Akan Pentingnya Lingkungan. *Public Sphere Review*, 88-100.
- Ashari, A., & Permata, S. (2021). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Yang Islami Di Desa Patilereng. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 52-66.
- Bahri, E. S. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. Fam Publishing.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135-143.
- Fadil, F. (2013). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal*, 2(2).
- Fajri, L. M. N. (2017). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 1(1), 11-22.
- Garis, R. R. (2017). Analisis Implementasi 4 Program Prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Di Kabupaten Ciamis (Studi kasus pada lima desa di Kabupaten Ciamis). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 108-130.
- Hakeu, F., & Alim, M. S. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pencapaian SDGs melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Mohuyula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1-9.
- Hakim, L. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 43-43.
- Harahap, R., & Sagala, M. S. (2024). The effect of village fund management on infrastructure development in Tanjung Putus village, Pegajahan district, Serdang Begadai regency: English. *Jurnal Ekonomi*, 13(01), 1025-1035.
- Hariyanto, A. (2010). Strategi penanganan kawasan kumuh sebagai upaya menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat (contoh kasus: kota Pangkalpinang). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota UNISBA*, 7(2), pp-11.
- Hariyanto, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 12(1), 24-29.
- Hasan, A., & Yusar Sagara, S. E. *PENGARUH PEMANGKU KEBIJAKAN GREEN SUKUK DAN ISLAMIC BRAND PERSONALITY (IBP) TERHADAP KEUANGAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA* (Master's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Hilman, Y. A., & Asmoro, Y. R. (2020). Peran Pemerintahan Desa dalam Melakukan Praktik Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal administrasi Pemerintahan Desa*, 1(2), 128-141.
- Hutauruk, R. P. S. (2021). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(1), 24-37.
- Intelman, M. W., & Idayati, F. (2024). Dampak Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa, Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 13(8).

- Irmansyah, I., Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. (2021). Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 4(2), 1086-1095.
- Jamaludin, A. N. (2016). Sosiologi pembangunan.
- Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kusumastuti, A. (2015). Modal sosial dan mekanisme adaptasi masyarakat pedesaan dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur. *Masyarakat, Jurnal Sosiologi*, 20(1), 6.
- Lasaiba, M. A. (2023). Pengolahan Data Spasial dalam Perencanaan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan. *GEOFORUM Jurnal Geografi dan Pendidikan Geografi*, 1-12.
- Latif, A., Irwan, I., Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 1-15.
- Latif, A., Rusdi, M., & Setiawan, D. (2020). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tani Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(1), 26-39.
- Lestari, D. S. T., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Program Industrialisasi Dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi Di Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 288-297.
- Malo, A., & Firdausi, F. (2019). Upaya Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Bidang Infrastruktur Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(3), 53-58.
- Marlina, E. (2019). Pengelolaan Objek Wisata Air Panas Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Cikupa Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 153-165.
- Mayasari, R., Febriantoko, J., Putra, R. R., Hadiwijaya, H., & Kurniawan, D. (2022). *Digitalisasi Desa: Pilar Pembangunan Ekonomi Desa*. Penerbit Nem.
- Mesa, J. B. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Soba Rade Dan Desa Puu Mawo, Kabupaten Sumba Barat (UU No. 6 Tahun 2014). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(5), 625-635.
- Mongilong, A., Singkoh, F., & Kairupan, J. (2018). Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara dalam Meningkatkan Profesionalisme Kerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Moridu, I., Purwanti, A., Melinda, M., Sidik, R. F., & Asfahani, A. (2023). Edukasi Keberlanjutan Lingkungan Melalui Program Komunitas Hijau Untuk Menginspirasi Aksi Bersama. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 7121-7128.
- Muhammad Rusli, R. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*.

- Mustofa, I., Azhari, F. M., Rahmawaty, F., & Rahmahima, B. A. (2023). Sosialisasi Anggaran Pengelolaan Konstruksi Berkelanjutan Melalui Pengabdian Masyarakat Pada Proyek Sekolah Dasar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mandiri (JPMM)*, 1(02), 44-49.
- Nelsi, M., Akbar, I. R., & Kristianti, L. S. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Guna Mencapai Desa Mandiri Sejahtera Di Desa Rancasumur, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang-Banten. *Abdi Jurnal Publikasi*, 2(6), 255-263.
- Nim, R. K. P. (2016). Peran Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Saba'u Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang. *GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(4).
- Nurnazmi, N., Ramadan, S., & Nurhasanah, N. (2022). Pendampingan Pekan Aspirasi sebagai Acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 1998-2016.
- Paru, S., Kaunang, M., & Sumampouw, I. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Poluan, K., Lengkong, F., & Londa, V. (2021). EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN MELALUI PENGGUNAAN DANA DESA (STUDI DI DESA ELUSAN KECAMATAN AMURANG BARAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN). *Jurnal Administrasi Publik*, 7(111).
- Putra, Krisna Widhiatma, and Lailul Mursyidah. "Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo." *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 5.2 (2023): 245-253.
- Putra, S. H. J., Sikka, M. G., Kolly, Y. A. C., Renggi, C. B., Embewe, M. F. C., Ahab, M. C., ... & Embewe, J. C. G. (2024). STRATEGI KOMUNITAS DALAM MENDUKUNG PENANAMAN POHON KETAPANG SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PANTAI DARI ABRASI DI DESA NANGAHLE, KECAMATAN SIKKA. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(5), 9380-9388.
- Qomaruddin, M. (2024). DESAIN BERKELANJUTAN DENGAN PEMANFAATAN LAHAN EFISIEN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU DI MTs. ITTIHADUT THOLIBIN. *Jurnal Diseminasi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 50-62.
- Rafiq, M. (2019). Upaya Dinas Koperasi UMKM & Tenaga Kerja (KUT) Kota Palu Dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Palu (Doctoral dissertation, IAIN Palu).
- Rahayu, D. (2017). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 6(2), 107-116.
- Rahmadini, M., Jannah, M., Putra, M. A., & Pertiwi, P. (2023). Analisis Proyek Pembangunan Gedung Kelas Baru Melalui SBSN di MAN Kota Sawahlunto. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 83-94.

- Rahman, A., & Sjoraida, D. F. (2017). Strategi komunikasi pemerintah kabupaten Subang menyosialisasikan gerakan pembangunan untuk rakyat infrastruktur berkelanjutan. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(2), 136.
- Rahmatika, Z., Nugraha, P. T., Hasibuan, F. Y., Lestari, K., Pratiwi, L. P., Qat, Q. D., ... & Ardana, T. V. (2024). PERAN AKSES JALAN DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING UMKM DI DAERAH TERPENCIL. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(9).
- Rijani, M., Munawarah, M., & Mahdalina, M. (2024). Efektivitas Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Muara Payang Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser. *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat Dan Kearsipan*, 1(2), 214-223.
- Robbani, M. R., & Nadhif, F. F. (2024). Implementasi Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dalam Transparansi dan Kendala Pengelolaan Proyek Jalan Raya di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 570-584.
- Rudy, R. (2022). Hukum pemerintahan desa.
- Rusandi, M. R. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*.
- Saleh, S. (2017). Analisis data kualitatif.
- Sembel, T., Gosal, R., & Pangemanan, S. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Setiadi, M. B., & Pradana, G. W. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Genilangit (Studi di Desa Wisata Genilangit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan). *Publika*, 881-894.
- Simamora, J., & Sarjono, A. G. A. (2022). Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 59-73.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295-302.
- SINUHAJI, J. F. (2016). ANALISIS ASPEK SOSIAL TERHADAP PEMBANGUNAN FLY OVER BANDAR LAMPUNG (Studi Kasus pada masyarakat di jln. Gajah Mada-Jln. Antasari).
- Siregar, F. A. (2023). PENGEMBANGAN USAHA AGROTURISME UNTUK DIVERSIFIKASI PENDAPATAN PETANI DI DAERAH PEDESAAN.
- Siswoyo, M., Komara, A., Siddiq, D. M., Putra, Y. P., & Lestari, I. (2022). Social Learning Theory dalam Pemodelan Pengembangan Wisata Embung Sarwadadi Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen*, 6(2), 189-202.
- Sondakh, H., Mantiri, M., & Kasenda, V. (2021). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tondei Kec. Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*, 1(1).

- Sudirman, S., Fauzan, A., & Mustakim, R. A. W. (2023). Pembuatan Website sebagai Media Pencitraan dan Promosi Pada Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupten Barru. *Ilmu Komputer untuk Masyarakat*, 4(1), 1-8.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- Sururi, A. (2015). Pemberdayaan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 3(2).
- Sutrisno, N., & Hamdani, A. (2019). Optimalisasi pemanfaatan sumber daya air untuk meningkatkan produksi pertanian. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 13(2), 73-88.
- Teras, D., & Zebua, D. (2023). PROSES PENAPISAN TERKAIT AMDAL PADA PEMBANGUNAN JALAN DI DESA BANGUN HARJA. *Jurnal Penelitian Jalan dan Jembatan*, 3(2), 24-31.
- Utami, V. R., Maharani, R., Aziza, V., Hariyani, W., & Noviarita, H. ANALISIS PERANAN BAPPEDA DALAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH.
- Wahida, K., & Uyun, H. (2023). Tatanan Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui green economy. *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial*, 1(2), 14-26.
- Wahyuningrum, R. D., & Kurniawati, A. D. (2024). Implementation of Rain-Fed Reservoirs as an Agricultural Irrigation Solution in Kedungbenda Purbalingga Village: Penerapan Embung Tadah Hujan sebagai Solusi Irigasi Pertanian di Desa Kedungbenda Purbalingga. *JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik dan Pengabdian Masyarakat)*, 8(1), 1-4.
- Wardhani, M. K. (2011). Kawasan konservasi mangrove: suatu potensi ekowisata. *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology*, 4(1), 60-76.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2901.
- Waruwu, M. H., & Halawa, O. (2024). ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA HILIBADALU KECAMATAN SOGAE'ADU KABUPATEN NIAS. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 7(2), 1747-1757.
- Zuhdi, S. (2018). Pemetaan Data Dan Informasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Jurnal Niara*, 11(1), 26-34.
- Zuliyah, S. (2010). Strategi pemberdayaan masyarakat desa dalam menunjang pembangunan daerah. *Journal of Rural and Development*, 1(2).
- Zusa, M. K. (2022). ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUBLIK TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada UMKM di Sekitar Area Exit Gerbang Tol Terbanggi Besar dan Exit Gerbang Tol Kota Baru Provinsi Lampung) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

LAMPIRAN

Interview Guide (Panduan Wawancara)
PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Nama Informan :
Jabatan/Pekerjaan :
Usia :
Tingkat Pendidikan :
Jenis Kelamin :
Tanggal Wawancara :

Daftar Pertanyaan

A. Pemerintah Desa Karangnanas:

1. Apa tujuan adanya pembangunan embung desa di Desa Karangnanas?
2. Meliputi apa saja proses tahapan dalam pembangunan infrastruktur embung desa?
3. Siapa saja yang terlibat dalam proses pembangunan infrastruktur? Apakah pemerintah desa melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan tersebut?
4. Apakah dalam proses pembangunan embung desa mengalami adanya kendala? Jika ada, bagaimana pemerintrah desa menangani kendala selama proses pembangunan embung desa tersebut?

B. Masyarakat Desa Karangnanas

1. Apakah anda mengetahui adanya pembangunan embung desa di Desa Karangnanas?
2. Menurut pandangan anda bagaimana ketransparan pemerintah desa dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa?
3. Menurut anda, bagaimana partisipasi masyarakat lokal dalam proses pembangunan embung desa dibandingkan dengan tenaga kerja dari luar desa?

4. Apakah anda merasa dilibatkan dalam proses pembangunan infrastruktur embung desa?
5. Menurut anda, apakah embung desa memenuhi kebutuhan masyarakat dan membantu permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat?

Surat Tugas Penelitian



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SEKOLAH, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 523/IT/2024

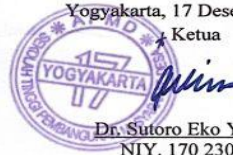
Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Nur Setyaji Prajoko
Nomor Mahasiswa : 21520095
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas
b. Sasaran : Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 17 Desember 2024

Ketua



Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.

Surat Permohonan Izin Penelitian



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK DESAA

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK DESAA
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A

• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI BAK DESAA

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515980, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 1004/I/U/2024

Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :

Kepala Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas
Di tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Nur Setyaji Prajoko
No Mhs : 21520095
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur
Tempat : Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas
Dosen Pembimbing : Dr. Gregorius Sahdan, M.A

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 17 Desember 2024
Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH DESA KARANGNANAS
KECAMATAN SOKARAJA - KABUPATEN BANYUMAS
KEPALA DESA KARANGNANAS
Jl. Protokol No. 15 Telp. (0281) 6575195 Kode Pos 53181
KARANGNANAS

SURAT KETERANGAN NOMOR : 470/019/II/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WARTO
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NUR SETYAJI PRAJOKO
Tempat/Tanggal lahir : Banyumas, 31 Maret 2003
Nama Kampus : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa
(STPMD) "APMD" Yogyakarta

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data melalui wawancara serta pengumpulan dokumen di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, dalam rangka keperluan penyusunan tugas/skripsi yang berhubungan dengan studi di kampus yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Karangnanas, 16 Januari 2024



Surat Penunjukan Dosen Pembimbing



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
STATUS TERAKREDITAS A (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989

Nomor : 081/PEM/J/X/2024

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Dr. Gregorius Sahdan., M.A

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	: Nur Setyaji Prajoko
No. Mahasiswa	: 21520095
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul	: 10 Oktober 2024

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.



Yogyakarta, 10 Oktober 2024

Ketua Program Studi

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

Dokumentasi Informan Penelitian

A. Pemerintah Desa Karangnanas



Dokumentasi setelah wawancara
bersama Warto selaku PJ Kepala Desa
Karangnanas



Dokumentasi setelah wawancara
bersama Parjoko selaku Kaur
Keuangan Desa



Dokumentasi setelah wawancara
bersama Sutarno selaku Kasi
Kesejahteraan



Dokumentasi setelah wawancara
bersama Angga Jati selaku Kaur
Perencanaan



Dokumentasi setelah wawancara bersama Pujiono selaku BPD

B. Masyarakat Desa Karangnanas



Dokumentasi wawancara bersama Sudaryo selaku masyarakat yang berprovesi petani



Dokumentasi wawancara bersamama Wasun selaku masyarakat yang berprovesi buruh

C. Lokasi pembangunan embung desa

